

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
(Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri
Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

Dinjukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

Oleh :
LAELI ADHI SAPUTRI
NIM. 082323025

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2014

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
(Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri
Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)**

**Oleh :
LAELI ADHI SAPUTRI
NIM. 082323025**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Laeli Adhi Saputri

NIM : 082323025

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 4 Januari 2014

Saya yang menyatakan,



Laeli Adhi Saputri
NIM. 082323025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdra. Laeli Adhi Saputri
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 13 Desember 2013

Kepada :
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

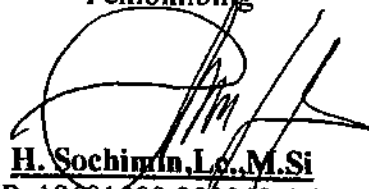
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Islam
Judul : **Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat diujikan dalam munaqosyah dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

H. Sochimn, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

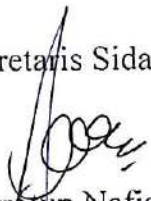
**(Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran
Banyumas Tahun 2009-2011)**

yang disusun oleh saudara/i: **Laeli Adhi Saputri**, NIM : **082323025**, Program Studi: **Ekonomi Islam**,
Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Januari**
2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syari'ah**
(S.E.Sy.) oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

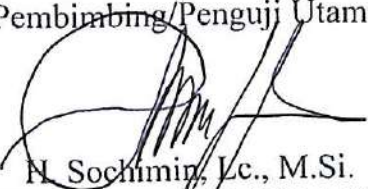
Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang


Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji Utama


H. Sochimir, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Anggota Penguji


Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Anggota Penguji


H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 197412117 200312 1 006

Purwokerto, 15 Januari 2014
Ketua STAIN Purwokerto


Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yangtelah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-NYA saja menyembah.

Q.S. An-Nahl : 114

It is never too late to be what you might have been

George Eliot

Berharap, berdo'a, dan berusaha.

Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Bapak Ach. Dimiyati dan Siti Sundari, terimakasih telah menjadi orang tua yang luar biasa untukku.
2. Lukman Adi Putra, S.E. dan Fajar Sa'bani Adhi, S.Sos. kalian kakak terhebat untukku.
3. Sapto Bagus Novianto.
4. Keluarga Bapak Ahmad Soderi - Siti Maemunah, terimakasih untuk sarana dan prasarana yang diberikan sampai saat ini.
5. Keluarga Besar Bani Abd.Cholil - Eyang Rukiyah Kedungparuk Ledug dan Keluarga Besar Eyang Dipawangsa Karangjati Sampang.
6. Rekan-rekan OBC Caring dan Unit Customer Care Telkom Witel Purwokerto.
7. Rekan-rekan Ekonomi Islam 2008
8. Almamater yang saya banggakan, STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya, petunjuk, dan jalan lapang bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini selesai berkat do'a, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Wakil Ketua I STAIN Purwokerto, Drs. H. Ansori, M.Ag, Wakil Ketua II STAIN Purwokerto, dan Dr. Abdul Basit, M.Ag, Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah dan Iin Solikhin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Ahmad Dahlan Rosyidin, M.SI, Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Islam.
5. Ahmad Dahlan Rosyidin, M.SI, Ketua Program Studi Ekonomi Islam.

6. H. Sochimim, Lc.,M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Syariah STAIN Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti.
8. Seluruh staf tata usaha, petugas perpustakaan dan karyawan jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
9. Ketua Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi beserta staf pembantu, Bapak Chajat, S.Pd terimakasih atas izin yang di berikan untuk penulis diperbolehkan melakukan penelitian.
10. Ibu Sulastri, selaku Faskel PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kembaran.
11. Kepala Desa Purwodadi beserta perangkat telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
12. Anggota KSM Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi.
13. Rekan rekan KKN Desa Cilongok Kecamatan Cilongok.
14. Rekan-rekan OBC Caring dan Unit Customer Care Telkom Witel Purwokerto, terimakasih atas kerjasama, kebijakan, kesempatan yang telah diberikan.
15. Rekan-rekan khususnya angkatan 2008 Program Studi Ekonomi Islam dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berbagai saran dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Purwokerto, 4 Januari 2014
Penulis

Laeli Adhi Saputri
NIM. 082323025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin disusun oleh tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI telah direvisi, Jakarta, 2003, dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	dza	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zay	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye

ص	shad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zda	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ kataba

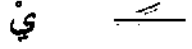
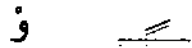
يَذْهَبُ yazhabu

فَعَلَ fa'ala

سُئِلَ su'ila

2) Vokal rangkap (difting)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

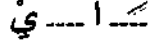
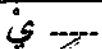
Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ Kaifa

هَوْلَ Haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau iya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis diatas

Contoh : قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta *marbuṭah* ada dua:

1) Ta *marbuṭah* hidup

tamarbuṭah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta *marbuṭah* mati

tamarbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir ta *marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	rauḍatu al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnatu al-munawwarah
طَلْحَة	ṭalhah

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā نَزَّلَ - nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلْ	Akala
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	ta'khudzuna
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	an-nau'u

7. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; dapat dipisah perkata dan dapat pula dirangkaikan. Namun penyusun memilih penyusunan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa annallāha lahua khairu ar-rāziqīna

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAKSI	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Penegasan Istilah	10
D. Tujuan dan Kegunaan	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DAN PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN

A. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan	25
1. Konsep Kemiskinan	26
2. Teori Perangkat Kemiskinan	28
3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	32
4. Penanggulangan Kemiskinan	34
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan	38
B. Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan	41
1. Latar Belakang dan Tujuan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan	41
2. Sasaran, Pendekatan, Prinsip, dan Strategi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan	44
3. Prosedur Mekanisme Penyaluran Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Kegiatan Dilihat Dari Sisi Masyarakat Penerima Dana Pinjaman Bergulir	50

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Variabel Penelitian	57
C. Sumber Data	57

D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data	60
 BAB IV : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT DALAM MENGURANGI	
KEMISKINAN DI PURWODADI KEMBARAN	
BANYUMAS	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	63
1. Keadaan Geografis	63
2. Keadaan Demografi	64
3. Sosial dan Ekonomi	66
B. Aktifitas Pemberdayaan Ekonomi Pada Anggota KSM Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas	68
C. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan di Purwodadi Kembaran Banyumas	70
D. Analisis SWOT Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas	75
E. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Peningkatan Optimalisasi Usaha Sebagai Strategi Lanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Pada Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2004-2009	7
Tabel 1.2 : Rekapituasi Data Warga Miskin Menurut Desa Tahun 2007-2001	7
Tabel 3.1 : Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT.....	61
Tabel 4.1 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Purwodadi Tahun 2011	64
Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2011	65
Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan Tahun 2011	66
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Purwodadi Tahun 2011	66
Tabel 4.5 : Daftar Kekuatan dan Kelemahan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi	76
Tabel 4.6 : Daftar Peluang dan Ancaman Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi	77
Tabel 4.7 : Matriks Analisis SWOT Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Perangkap Kemiskinan.....	29

ANALISIS PROGRAM PEMBARDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

**(Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di
Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)**

Laeli Adhi Saputri
Email : laeli_adhi@ymail.com

Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto



ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas. Penelitian ini berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011).”

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui peranan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan terhadap anggota, serta untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada program tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dalam analisisnya, penyusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT dari faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan masyarakat merasa terbantu secara ekonomi dengan adanya Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Masyarakat yang terkendala masalah modal dapat dibantu dengan menjadi anggota KSM. Dan dari pihak PNPM juga memberikan arahan strategi yang sebaiknya dilakukan agar usaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, PNPM juga membuka pelatihan ketrampilan tertentu bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dan mendalami ilmu ketrampilan yang sudah dimilikinya. Hal tersebut dirasa mampu membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan dan dapat dijadikan sarana dalam mengurangi kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan ketrampilan yang dimilikinya tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Kata kunci : PNPM Mandiri Perkotaan, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia, karena melibatkan seluruh aspek kehidupan, walaupun seringkali kehadirannya tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Seperti yang dikemukakan dalam Habitat for Humanity Australia yakni :

“Poverty is hunger, poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see doctor, poverty is not having access to school and knowing how to read, poverty is not having job, is fear for the future. Living one day at time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.”¹

“Kemiskinan adalah kelaparan, kemiskinan adalah kurangnya tempat penampungan, kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk ke dokter, kemiskinan tidak memiliki akses ke sekolah dan mengetahui bagaimana membaca, kemiskinan tidak memiliki pekerjaan, rasa takut untuk masa depan, tinggal satu hari saat. Kemiskinan adalah kehilangan seorang anak terhadap penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan.”

Pada awalnya fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Namun kemudian definisi kemiskinan semakin meluas tidak hanya pada kemiskinan ekonomi.

¹ Habitat for Humanity Australia. *Poverty Housing Fact Sheet*. (Online) : <http://www.habitat.org.au/document.doc?id=120> diakses pada 23 Januari 2013.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional karena terkait erat dengan dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial sehingga bukan hal yang mudah untuk menghitung jumlah penduduk miskin.

Walaupun demikian, belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru muncul pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.²

Dapat dikatakan bahwa dalam era pembangunan Indonesia hampir semua program-program pembangunan sektoral adalah tertuju untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, laju pertumbuhan sebagai akibat pembangunan itu, pasti berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan tahap demi tahap. Dalam mekanisme pembangunan ini sudah tentu terdapat beberapa strategi, dimana beberapa program akan mempunyai dampak yang langsung kepada penanggulangan kemiskinan, tetapi ada pula yang memberi dampak tidak langsung, bahkan terdapat program-program yang hanya dalam posisi menggalang dan mendukung gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan yang langsung menangani masalah kemiskinan tersebut.³

Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan

² Soetrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Philosophy Press, 2000), hlm. 1.

³ Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta : Media Widya Mandala, 1995), hlm. 232.

belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat ke permukaan. Ada sejumlah pakar yang menyatakan bahwa apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa negara di Asia, masyarakat di Indonesia sudah memasuki kategori *moderate inequality*. Artinya, perbedaan tingkat kemakmuran antar berbagai golongan dalam masyarakat sudah mulai mendekat. Namun demikian, dalam kenyataannya jumlah golongan miskin masih besar, bahkan terus membengkak.⁴

Perluasan kesempatan kerja yang produktif dan terbukanya kesempatan yang sama bagi semua golongan penduduk, menjadi saluran bagi peningkatan keadilan sosial dan mutu kehidupan. Karenanya, penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, perluasan kesempatan kerja yang produktif, serta penentuan sistem pemberian imbalan/upah yang memadai, adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus pemerataan pembagian pendapatan antargolongan penduduk.⁵

Keadilan pemerataan adalah salah satu komponen yang terpenting dalam pandangan Islam terhadap tatanan sosio-ekonomi yang adil. Segi yang paling patut diperhatikan dalam skema pemerataan yang adil sebagaimana dipertimbangkan oleh Islam adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, terlepas dari tahapan pembangunan sebuah negara. Hal ini menyiratkan secara tidak langsung pemberantasan yang sempurna terhadap kemiskinan absolut. Aspek kedua dari pemerataan yang adil adalah

⁴ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 26.

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 26.

berkaitan dengan pola umum pemerataan pendapatan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, tinjauan Islam lebih fleksibel dimana garis pedoman untuk pola pemerataan pendapatan dan kekayaan yang diharapkan terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang tertulis dalam ketentuan-ketentuan umum dan memperkenankan banyak kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan kemiskinan.⁶ Dan salah satu diantara kebijakan-kebijakan utama yang umum diambil dalam mengurangi atau mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah diantaranya dengan memperbaiki distribusi pendapatan melalui redistribusi pemilikan aset secara progresif, yang diantara lain melakukan melalui land reform, dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil.⁷

Salah satu pembaruan strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan yang tercantum dalam GBHN 1993 dan penjabaran Repelita VI adalah pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemihakan dan pemberdayaan diwujudkan dalam penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Penyempurnaan ini diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bantuan dana, prasarana dan sarana dalam mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam usaha bersama.

⁶ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Yasa, 1998), hlm. 2-3.

⁷ Rustian Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 48.

Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk diharapkan dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan.⁸

Niat untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai target-target lainnya di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak pemerintahan Orde Baru, dan juga telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye pilpres saat menargetkan penurunan orang miskin dari sekitar 16% tahun 2005 menjadi 8,2% tahun 2009. Dan salah satu program konkret yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2007 untuk mengurangi kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),⁹ yang memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain pemerintah telah memerhatikan faktor partisipasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan.

Dulu program ini bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sejak tahun 2008. Penganggulan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, siosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu

⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 14-16.

⁹ Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 234-238.

pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Di Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk miskin menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Data tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sehingga, dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari 4 jiwa, maka pada tahun 2006 terdapat 693.544 jiwa penduduk miskin, tahun 2007 sebanyak 690.324 jiwa penduduk miskin, tahun 2008 sebanyak 602.588 jiwa penduduk miskin dan tahun 2009 sebanyak 564.684 jiwa penduduk miskin atau dengan kata lain mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,46% pada tahun 2007, pada tahun 2008 sebesar 12,71 persen sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 6,29%.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, Gunawan, berdasarkan pendataan tahun 2006 hingga 2010 angka penduduk miskin di Banyumas mengalami penurunan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mencapai 360 ribu jiwa, sementara pada tahun 2010 menurun menjadi 300 ribuan jiwa atau menurun dari 24% menjadi 19% dari 1,5 juta jiwa penduduk Banyumas. Pada tahun 2006 tingkat dan jumlah kemiskinan sebanyak 24% dari jumlah penduduk, tahun 2007 menurun menjadi 22%. Sementara tahun 2009 menjadi 21% dan 2010 kembali menurun menjadi 19%.¹⁰

¹⁰ <http://satelitnews.co/2013/01/17/warga-miskin-di-banyumas-alami-penurunan>.

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2004-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Perubahan KK	Presentase Perubahan (%)
2006	173.386	-128	-0,07
2007	172.581	-805	-0,46
2008	150.647	-21.934	-12,71
2009	141.171	-9.476	-6,29

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun 2009.¹¹

Gambaran tersebut menjadikan sebuah acuan untuk lebih menekan lagi angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Dengan peran penting dari pemerintah serta tindakan kooperatif dari masyarakat dapat menurunkan angka kemiskinan yang lebih signifikan lagi.

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Data Warga Menurut Desa Tahun 2007 dan Tahun 2011

No	Desa	2007		2011	
		Warga	KK	Warga	KK
1	Ledug	10.086	3.022	12.353	3.712
2	Pliken	8.114	2.040	8.285	2.011
3	Purwodadi	1.578	451	1.647	453
4	Karang Tengah	2.415	715	2.606	648
5	Kramat	2.822	766	2.807	753
6	Sambeng Wetan	1.488	404	1.254	373
7	Sambeng Kulon	1.738	525	1.824	497
8	Purbadana	3.018	784	3.031	778
9	Kembaran	5.168	1.325	5.344	1.356
10	Bojongsari	5.077	1.529	6.533	1.719
11	Karangsoka	1.839	471	1.853	496
12	Dukuhwaluh	8.535	2.065	9.373	2.635
13	Tambaksari Kidul	3.563	990	3.989	945
14	Bantarwuni	3.074	887	3.407	855
15	Karangsari	2.784	775	3.352	762
16	Linggasari	5.667	1.590	5.586	1.406
Jumlah		66.966	18.339	73.244	19.399

Sumber : Kecamatan dalam angka

¹¹ Buku Laporan Sistem Informasi Profil Daerah Semester I Tahun 2010.

Di desa Purwodadi, jumlah penduduk pada tahun 2011 menunjukkan angka 1.647 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 827 warga dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 820 warga. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani¹² karena peta geografis dari Desa Purwodadi sebagian adalah daerah persawahan. Jika hanya dengan mengandalkan hasil dari petani, dirasa kurang memenuhi standar hidup yang layak jika mempertimbangkan biaya hidup dan pendidikan saat ini semakin besar. Dan berdasarkan data penerimaan Jamkesda yang ada di Desa Purwodadi berjumlah 928 jiwa yakni 56,3% dari jumlah penduduk yang ada, hal ini berarti sebagian besar warga Desa Purwodadi tercatat sebagai warga yang kurang mampu. Dengan adanya Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan mampu membantu masalah permodalan bagi masyarakat yang akan atau sedang menjalankan usaha mikro sebagai usaha sampingan untuk membantu perekonomian keluarga.

Dari jumlah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sampai dari tahun 2009 sampai tahun 2011 berjumlah 238 anggota jika dibandingkan dengan jumlah warga Desa Purwodadi yang berjumlah 1.647 jiwa yakni 14,5% dari jumlah penduduk Desa Purwodadi ini dirasa cukup mewakili. Karena ini merupakan pinjaman bergulir yang pada dasarnya dalam penerimaan dananya pun dilakukan secara bergulir, di mana maksimal pengajuan pinjaman dana sebanyak 4 (empat) kali

¹² Data Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran.

dan maksimal pengajuan sebesar Rp 2.000.000,- setiap anggota. Jadi setiap penduduk berpeluang untuk mengikuti Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan merupakan stimulus bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal yang lebih besar lagi kepada lembaga keuangan yang lainnya.

Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Purwodadi Kembaran karena ada potensi keinginan yang besar bagi masyarakat yang tergolong miskin untuk dapat merubah kondisi ekonomi yang lebih baik. Dengan bantuan dari pemerintah sebagai fasilitator yakni menyediakan bantuan modal berupa dana pinjaman dan fasilitas pelatihan gratis yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga masyarakat dapat memberdayakan diri melalui kemampuan yang sudah dimiliki untuk merubah keadaan ekonomi yang lebih baik.

PNPM Mandiri Perkotaan mulai diadakan di Desa Purwodadi pada tahun 2008, dan mulai mendapat respon positif dari masyarakat yakni di tahun 2009 dimana salah satu program dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Program Pinjaman Bergulir dirasa mampu membantu masalah permodalan bagi masyarakat Desa Purwodadi untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan ataupun membentuk usaha bersama melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana dampak program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya mengurangi kemiskinan di perkotaan

(Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2011).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peranan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas terhadap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud judul di atas, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan masyarakat

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.¹³

Menurut Robinson, pemberdayaan adalah suatu proses probadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan menurut Ife, pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

¹³ <http://artikata.com> (online : diakses pada 15 Januari 2014).

Menurut Slamet, menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagi alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan masalah berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat adalah rancangan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kepentingan untuk menanggulangi atau mengurangi kemiskinan yang ada.

2. Kemiskinan

Menurut Sar A. Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu

¹⁴ Sanjaya Yasin, *Pembaedayaan Masyarakat Pengertian, Proses, Tujuan*, Jurnal Blog Pendidikan Indonesia (online : www.sarjanaku.com, diakses pada 25 November 2013).

¹⁵ Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri (online : www.pnpm-mandiri.org diakses pada 25 Desember 2013).

standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Bradley R. Schiller, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Di Indonesia, batasan lain tentang kemiskinan dikembangkan oleh Sajogyo dari Institut Pertanian Bogor (IPB), yakni kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kehidupan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Menurut Sajogyo, seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memperoleh penghasilan per kapita setara 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, atau 480 kilogram beras untuk penduduk di perkotaan.¹⁶

3. PNPM Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.¹⁷ PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta meknisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan

¹⁶ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hlm. 1-2.

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Sisitem Pengelolaan Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.¹⁸

D. Tinjauan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas terhadap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- b. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) anggota KSM dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penyusun, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dalam menganalisis suatu program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu mengembangkan sosialisasi pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri (online : www.pnpm-mandiri.org diakses pada 25 Desember 2013)

- c. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Soetrisno R dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan* membahas tentang pengertian kemiskinan, kemiskinan natural, kemiskinan struktural serta perangkat kemiskinan. Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Soetrisno R mengutip study yang dilakukan Wignjosuebrotodkk (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan di Kotamadya Surabaya menemukan bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang dijejaskan kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Kemiskinan merupakan suatu proses

panjang yang melibatkan tarik-menarik serta interaksi berbagai faktor. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab, tetapi lebih sebagai akibat dari adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktur masyarakat. Soetrisno R juga mengutip pernyataan Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau “perangkap kemiskinan”. Serta adanya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentas dan mempercepat upaya menghapus kemiskinan.¹⁹

Bagong Suyanto dalam bukunya *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* juga membahas tentang pengertian kemiskinan, perangkap kemiskinan dan anatomi kemiskinan dan upaya pengentasannya. Dalam buku ini Chambers mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam perangkap kemiskinan adalah kerentaan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan dan isolasi. Kekuatan dari kelima unsur perangkap kemiskinan tersebut berbeda-beda, namun yang paling menjengkelkan adalah bila semuanya secara bersama-sama saling terpinjal dan membentuk jaringan orang memerangkap orang dalam kemelaratan. Dalam buku ini juga disebutkan tentang pendapat Arief Budiman (1992), sebuah keluarga yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali mengalami penurunan kualitas

¹⁹ Soetrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm. 8-24.

kehidupan.²⁰ Serta Rustian Kamaluddin dalam buku yang berjudul *Pengantar Ekonomi Pembangunan* juga membahas tentang kemiskinan (luas dan besarnya).²¹

Britha Mikkelsen dalam buku *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* bahwa pada permulaan tahun 1990-an, Bank Dunia menghidupkan kembali perhatiannya terhadap kemiskinan, dengan demikian mengembalikan tema-tema yang menjadi ciri strategi Bank Dunia dalam tahun 1970-an, yaitu “redistribusi pertumbuhan” dan “kebutuhan pasar”. Sebagai hasilnya, laporan Pembangunan Bank Dunia tahun 1990 menyajikan strategi baru untuk mengurangi kemiskinan. Strategi Bank Dunia mengumpulkan masalah-masalah lama mengenai pengentasan kemiskinan dalam kerangka baru dan dengan demikian menghasilkan suatu agenda yang berguna untuk pembahasan selanjutnya. Agenda kemiskinan yang baru ini terdiri dari tiga bagian : (1) membuka kesempatan ekonomi untuk golongan miskin : mengembangkan pertumbuhan padat-karya dan meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan para petani kecil; (2) investasi dalam sumber daya manusia : memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin, terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian : program-program Aksi Sosial diganti dengan Dana-Dana Sosial, yakni dana pemerintah untuk menunjang jaring pengaman informal. Strategi rangkap tiga

²⁰ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hlm. 1-7.

²¹ Rustian Kamaluddin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 45.

Bank Dunia memperoleh dukungan luas dari badan-badan pembangunan multilateral dan bilateral.²²

Tulus Tahin Hamonangan Tambunan dalam buku *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri* membahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, kemiskinan di Indonesia dari perspektif dunia, juga pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Indonesia.²³

Ziauddin Ahmad dalam buku *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* mengemukakan tentang kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, yang disimpulkan dari ajaran Islam yakni Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Kerangka kebijakan tersebut meliputi pemberdayaan usaha produktif, pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam, peraturan tentang praktek-praktek bisnis, kesempatan yang adil, hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam, hukum-hukum warisan, faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan, pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin, kebijakan fiskal dan moneter, serta sistem jaminan sosial Islam.²⁴ Dalam buku ini juga dikemukakan tentang pendekatan Islam dibanding dengan dua sistem besar yaitu sosialis dan komunis. Keistimewaan pendekatan Islam dibanding sistem sosialis yaitu

²² Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 197-198.

²³ Tulus Tahin Hamonangan Tambunan, *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 171-194.

²⁴ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 15-53.

Islam dengan tegas menentang aspek-aspek kebijaksanaan yang disokong oleh filosofi kapitalis untuk mencapai tujuan tersebut seperti kepemilikan dan pengontrolan alat-alat produksi, pusat kekuasaan ekonomi, sistem motivasional, dan proses-proses sosial untuk mengkoordinasikan ekonomi. Sedangkan keunggulan pendekatan Islam dibandingkan dengan sistem kapitalis adalah sifat perintah dari sistem jaminan sosialnya.²⁵

Gunawan Sumodiningrat dalam buku yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, membahas tentang strategi dasar pemberdayaan masyarakat, kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, juga program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, mekanisme pembentukan modal (*capital accumulation*) yang benar merupakan kunci pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang. Proses penumpukan modal yang benar muncul dari dalam yakni : dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dinikmati masyarakat. Secara nasional, strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat disyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.²⁶

Isbandi Rukminto Adi dalam buku yang berjudul *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*,

²⁵ *Ibid.* hlm. 106.

²⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 129-136.

membahas tentang konsep pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan bukan hanya ada pada satu interpretasi, melainkan bisa lebih dari satu interpretasi (*multiple interpretation*), dimana interpretasi yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama tergantung dengan tujuan dan target pemberdayaan, dan dalam suatu upaya pemberdayaan, dukungan dari pihak luar diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.²⁷

Didin S. Damanhuri dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, membahas tentang salah satu teori pembangunan liberal yang berpengaruh pada negara sedang berkembang yakni teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurske. Dimana lingkaran setan kemiskinan merupakan suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin. Selain itu, negara tersebut akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurske berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu. Akan tetapi hal ini juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Hal terpenting dalam lingkaran kemiskinan adalah segala keadaan yang menimbulkan adanya hambatan dalam pembentukan modal yang tinggi. Dimana, suatu pihak yakni masyarakat pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak yakni investor pembentukan modal ditentukan oleh perangsang untuk

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 77-82.

menanam modal. Keadaan dua faktor tersebut di negara-negara berkembang yang tidak memungkinkan adanya pembentukan modal yang tinggi.²⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maya Putri Kirana yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat* memberikan hasil dari pelayanan yang diberikan oleh BKM yakni melakukan proses pemberdayaan kepada KSM serta dari modal yang dipinjamkan dan jenis usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh responden yang telah menerima pinjaman bergulir.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yoni Yulianti yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok* memberikan hasil dimana pengetahuan masyarakat yang minim sekali terhadap PNPM Mandiri perkotaan dan belum optimalnya peranan pihak terkait dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi akan menimbulkan dampak menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga program yang sudah di rancang tidak dapat berjalan secara optimal.³⁰

²⁸ Didin S. Damanhuri. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, (Bogor : PT.Penerbit IPB Press, 2010), hlm. 17-18.

²⁹ Maya Putri Kirana, *Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat*, Departemen Ilmu Kesehatan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2012, (online : <http://responstitory.ucc.ac.id/handle/123456789/34690>, diakses pada 1 Mei 2013).

³⁰ Yoni Yulianti, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*, Program Pasca Sarjana

Penelitian senada juga dilakukan oleh Nurul Choiriyah yang berjudul *Makalah Makalah PNPM Mandiri Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pedesaan* memberikan hasil yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program PNPM Mandiri perkotaan juga akan menjadi kendala optimalnya pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, yang dimana tujuan dari program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dalam Executive Summary Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011 yang mengambil lokasi penelitian di Bandung, Pekalongan, Pangkal Pinang dan Makasar menyimpulkan untuk Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika ada perubahan pola pandangan masyarakat yang menerima proyek (*top down*), menjadi perencana, pelaksana dan pemelihara proyek (*bottom up*). Upaya pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok peduli untuk menjaga kelanjutan BKM. Pemberdayaan diutamakan pada keaktifan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan peran tokoh masyarakat yang penting untuk menggerakkan anggota masyarakat.

Universitas Andalas Padang, 2012, (online : <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PARTISIPASI-MASYARAKAT.pdf>, diakses pada 1 Mei 2013).

³¹ Nurul Choiriyah, *Makalah Makalah PNPM Mandiri Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pedesaan*, Yogyakarta, 2011, (online : <http://dhechoiriyah-nurul.blogspot.com/2012/05/makalah-pnpm-mandiri-sebagai-upaya.html>, Diakses pada 1 Mei 2013).

Sedangkan untuk pengembangan usaha dan ekonomi kecil-menengah, pengembangan usaha dilakukan dengan masuknya BKM dan programnya ke peraturan daerah, dan adanya percepatan ekonomi keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Dapat juga dengan memanfaatkan kelompok usaha bersama masyarakat misalnya lembaga koperasi. Hasil PNPM berupa perlindungan sosial menurut pengelola, memiliki kinerja terbaik disusul pemberdayaan masyarakat kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Menurut masyarakat, hasil PNPM berupa pemberdayaan masyarakat memiliki kinerja terbaik disusul perlindungan sosial kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah.³²

Berangkat dari penelitian terdahulu dalam skripsi ini peneliti ingin mencoba memberikan gambaran secara khusus tentang analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan persepsi anggota KSM terhadap Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Purwodadi Banyumas.

F. Sitematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan kripsi ini, penulis permudah pembagian skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman

³² Badan Penelitian Dan Pengembangan Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, *Executive Summary Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011*, (online : <http://sosekling.pu.go.id/attachment/article/350/Penelitian%20dan%20Pengembangan%20Pengelolaan%20PNPM%20Mandiri.pdf>, diakses pada 2 April 2013).

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstraksi.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima Bab, dimana gambaran mengenai tiap Bab dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan meliputi : beberapa konsep tentang kemiskinan, teori perangkat kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan meliputi : latar belakang dan tujuan pinjaman bergulir; serta sasaran, pendekatan, prinsip, dan strategi pinjaman bergulir.

Bab III, Metode penelitian meliputi : jenis penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian muncul sebuah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT) dari Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul, penulis mencoba merumuskan strategi lanjutan bagi anggota KSM untuk lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan pendapatan.

Bab IV, Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Purwodadi Kembaran Banyumas, meliputi : deskripsi wilayah penelitian, prosedur pemberian pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas, aktifitas pemberdayaan ekonomi pada anggota KSM Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas, analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Purwodadi Kembaran Banyumas, analisis SWOT pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas, kemudian strategi pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan optimalisasi usaha sebagai strategi lanjutan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan pada anggota KSM

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DAN PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal, yaitu : (1) teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan; (2) teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep; dan (3) teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang sering muncul akibat adanya ketimpangan yang cukup tajam pada aspek distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi keluarga. Dengan struktur sosial yang timpang akhirnya memunculkan kondisi yang sering disebut oleh para ahli sebagai “kemiskinan struktural”, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya tidak

memiliki keberdayaan untuk dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.³³

Menurut Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Menurut Bradley R. Schiller dalam Bagong Suyanto menyatakan kemiskinan adalah ketidakanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Menurut jenisnya, kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Menurut kriteria Bank Dunia : (1) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang sangat timpang, (2) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17% dari pendapatan nasional maka disebut ketidakmerataan sedang, dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan

³³ Soetrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Philosophy Press, 2001), hlm. 2-19.

pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.

Kedua, kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) ditetapkan batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per orang plus beberapa kebutuhan non-makanan lainnya, seperti sandang, papan, jasa, dan lain-lain.

Kemudian menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain.

Kedua, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural yakni yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Menurut Selo Soemardjan (1980), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur

sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya.

Selain kemiskinan, menurut Robert Chambers, unsur yang terkandung dalam perangkat kemiskinan adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan dan isolasi. Kekuatan dari kelima unsur perangkat kemiskinan tersebut berbeda-beda, namun yang paling ironis adalah bila semua secara bersama-sama saling terkait dan membentuk jaringan orang merangkap orang dalam kemiskinan.

Menurut Arief Budiman, sebuah keluarga yang terbelit perangkat kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali mengalami penurunan kualitas kehidupan.³⁴

2. Teori Perangkat Kemiskinan

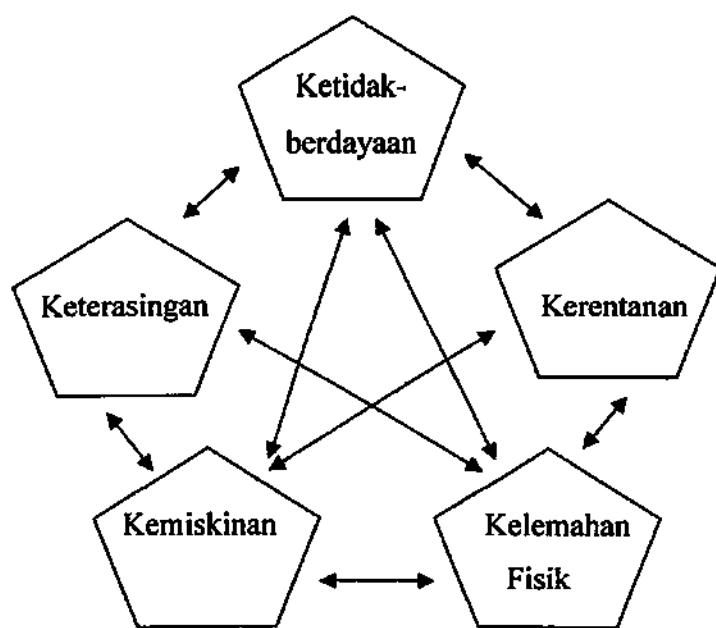
Kemiskinan merupakan suatu proses panjang yang melibatkan tarik-menarik serta interaksi berbagai faktor. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab, tetapi lebih sebagai akibat dari adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktural masyarakat. Oleh sebab itu definisi kemiskinan yang dikemukakan

³⁴ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hlm. 1-5.

Chambers cukup relevan dalam kondisi tersebut. Chambers mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau “perangkap kemiskinan”.

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan, satu dan lainnya terjadi dalam suatu kerangka “perangkap kemiskinan”.

PERANGKAP KEMISKINAN



Gambar 2.1 Perangkap Kemiskinan³⁵

Perangkap kemiskinan (*Deprivation trap*) terdiri dari lima unsur, yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan atau kadar isolasi; (4) kerentanan; dan (5) ketidakberdayaan. Dalam jaringan interaksi kemiskinan kelima unsur tersebut saling berkaitan satu

³⁵ Soetrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pemberantasan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Philosophy Press, 2001), hlm. 24.

dengan yang lainnya dan membahayakan peluang hidup masyarakat atau keluarga miskin.

Menurut Chambers, kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi yang darurat dan terjadi secara tiba-tiba. Atau dapat dikatakan bahwa kerentanan merupakan kondisi dimana suatu keluarga miskin tidak mempunyai kesiapan mental dan material dalam menghadapi situasi sulit yang dialaminya. Kerentanan inilah yang membuat kondisi sebuah keluarga miskin menjadi semakin rentan dan tidak berdaya.

Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana oknum aparat pemerintah yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk keluarga miskin, namun disalurkan tidak tepat pada sasaran. Ketidak berdayaan keluarga miskin diidentikkan dengan seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dan ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan untuk keluarga miskin dengan kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi.

Sebuah keluarga miskin mampu tetap bertahan atau bahkan bisa bangkit kembali jika mereka mempunyai jaringan yang dapat menjamin kehidupan dan dapat mengentaskan mereka dari perangkap kemiskinan. Tetapi, sebuah keluarga atau seseorang yang jatuh pada perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali dan seseorang atau keluarga yang terbelit perangkap kemiskinan terkadang tidak bisa ikut

menikmati hasil pembangunan, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan.³⁶

Kemudian salah satu teori pembangunan liberal yang berpengaruh di negara yang sedang berkembang adalah teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious cycle of poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurske adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin. Selain itu, negara tersebut akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dalam mengemukakan teorinya, Nurske berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu. Akan tetapi hal ini juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan pada masa lalu. Akan tetapi hal ini juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Baginya, hal terpenting dalam lingkaran kemiskinan adalah segala keadaan yang menimbulkan adanya hambatan dalam pembentukan modal yang tinggi. Dimana, di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Keadaan dua faktor tersebut di negara-negara berkembang inilah yang tidak memungkinkan adanya pembentukan modal yang tinggi. Sehingga menurut Nurske, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari sisi penawaran modal dan dari sisi permintaan modal.

³⁶ *Ibid*, hlm. 24-28.

Dari segi penawaran modal dapat dinyatakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah –yang diakibatkan oleh produktivitas rendah– menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Rendahnya tabungan masyarakat tersebut akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah pula. Modal yang rendah pada akhirnya akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang dan modal. Dengan demikian, tingkat produktivitas akan tetap rendah.

Dari sisi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin, perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena terbatasnya pasar untuk berbagai jenis barang. Terbatasnya pasar tersebut tidak lain disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya rangsangan untuk menanam modal.³⁷

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor lain penyebab kemiskinan menurut Edis Suharto yakni :

a. Faktor Ekonomi

Yakni turunnya pertumbuhan ekonomi, akibat adanya inflasi, deflasi dan sebagainya, menimbulkan kemiskinan, sehingga

³⁷ Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, (Bogor : PT Penenrbit IPB Press, 2010), hlm. 17-18.

kemiskinan relatif dan absolut semakin bertambah. Kemiskinan akibat perekonomian dapat diselesaikan diatasi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan merata. Disamping itu pertumbuhan ekonomi juga kelangkaan sumber-sumber daya ekonomi merupakan salah satu sebab timbulnya kemiskinan.

b. Faktor Individual

Terkait dengan aspek patalogi, termasuk kondisi fisik dan psikologis. Orang yang menjadi miskin karena adanya kecacatan pribadi, dalam arti fisik, mental (*attitude*), malas, tidak jujur, merasa terasing sehingga mereka tidak dapat mencari pekerjaan.

c. Faktor Sosial

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak orang menjadi miskin. Misalnya terdapat deskriminasi, berdasarkan usia, gender, etnis, yang menyebabkan orang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini ialah kondisi sosial keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

d. Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk konsep “kemiskinan kultural” atau budaya kemiskinan. Menghubungkan dengan penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin : bahwa memang ada apa yang disebut kebudayaan kemiskinan, yaitu pola kehidupan masyarakat yang mencerminkan pola hidup apatis, ketidak jujuran, ketergantunga,

motivasi yang rendah, ketidak stabilan keluarga dsb. Kebudayaan kemiskinan merupakan ciri dari suatu negara miskin .

e. Faktor Struktural

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoriberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terusdapat memumupk kekayaan.³⁸

4. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, penentuan kelompok sasaran (*targeting*) penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan umum (*universal*) dan pendekatan khusus (*ideal*). Dengan pendekatan umum, program pembangunan baik berupa bantuan dana, prasarana dan sarana diberikan kepada semua daerah dan semua penduduk secara sama. Keuntungan dari pendekatan ini adalah mudah diterapkan karena tidak memerlukan indikator sosial ekonomi yang lengkap sebagai dasar penentuan kelompok sasaran. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah sangat mahal karena mempunyai risiko kebocoran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan bukan hanya penduduk

³⁸ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 89-91.

yang paling memerlukan saja yang menikmati, tetapi seluruh penduduk yang bukan kelompok sasaran program dan tinggal dalam wilayah tersebut ikut memanfaatkan program tersebut. Disamping itu daerah yang telah siap dan mempunyai potensi yang lebih baik justru terlebih dahulu menikmati bantuan tersebut. Sebaliknya daerah yang tidak siap akan makin tertinggal sehingga mendorong urbanisasi ke daerah yang lebih maju. Dengan pendekatan khusus, bantuan diberikan kepada penduduk sebagai kelompok sasaran di daerah yang benar-benar memerlukan sehingga kebocoran dapat ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan kelompok sasaran ditentukan sendiri oleh masyarakat. Perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan bantuan dilakukan oleh masyarakat secara musyawarah. Syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dalam penentuan kelompok sasaran dan kejelasan mengenai kriteria alokasi bantuan.

Dalam PJP II dan Repelita VI penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan menyatu dengan sasaran makro pembangunan nasional terutama sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam PJP II sasaran penanggulangan kemiskinan yang secara khusus akan dicapai adalah teratasinya secara tuntas kemiskinan absolut, baik di perdesaan maupun di perkotaan, dan berkurangnya desa tertinggal. Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam Repelita VI adalah berkurangnya penduduk miskin absolut menjadi sekitar 12 juta orang, atau 6% dari seluruh penduduk Indonesia. Pencapaian sasaran tersebut akan ditentukan oleh kebijaksanaan pembangunan baik terkait langsung dengan

upaya penanggulangan kemiskinan maupun kebijaksanaan lain yang secara tidak langsung mempengaruhi penanggulangan kemiskinan.

GBHN menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada upaya untuk membangun masyarakat yang makin berkeadilan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peluang kepada rakyat untuk berperan serta aktif memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis menggerakkan dan memacu pembangunan di segala bidang sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pelaksanaan unsur pertama Trilogi Pembangunan mensyaratkan bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus juga mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pemerataan pembangunan berarti pemanfaatan semua potensi yang ada secara optimal bagi pembentukan landasan pembangunan yang luas dan kuat berdasarkan kemampuan sendiri. Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya diharapkan akan makin diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan berkurang.

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok. Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin.

Kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Ketiga, kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula termasuk penciptaan ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan yang paling tepat dalam pembangunan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Upaya peningkatan kemampuan menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu : (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih

baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap informasi pasar. Prodek yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan perlu diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus dan (4) akses terhadap sumber daya pembiayaan.

Kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Penyiapan penduduk ini bersifat situasional sesuai dengan tingkat permasalahan dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Peran tokoh masyarakat termasuk aparat daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi amat sangat penting dalam proses transisi ini. Bagian dari kebijaksanaan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi layanan kepada penduduk miskin. Kebijakan ini dilaksanakan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁹

5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial

³⁹ Gunawan Sumidingrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT.Bina Rena Pariwara, 1996), hlm. 44-49.

ekonomi yang dihadapi. Diperlukan suatu strategi atau arah baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama, pemihakkan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Dan ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Strategi pembangunan seperti itu perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah yaitu yang menghasilkan akan menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati adalah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Dalam proses perubahan struktur diperlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat modern yang telah lebih maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju. Dengan sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lemah untuk lebih maju. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan

kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat diantara yang telah maju dengan yang belum berkembang lemah atas dasar saling menguntungkan. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, maka mekanisme pembentukan modal (*capital accumulation*) yang benar merupakan kunci dari pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang. Proses penumpukkan modal yang benar muncul dari dalam sendiri yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dinikmati masyarakat sehingga tumbuh berkembang secara alamiah. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat disyaratkan berperanserta dalam

proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.⁴⁰

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan.

B. Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

1. Latar Belakang dan Tujuan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

a. Latar Belakang Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk

⁴⁰ Gunawan Sumidingrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT.Bina Rena Pariwara, 1996), hlm. 41-44.

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menaggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tuga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial, dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir dimasa lalu dapat menjadi

pembelajaran bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain :

- 1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan.
- 2) Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal.
- 3) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan.
- 4) Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.
- 5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

b. Tujuan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan

kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga miskin dan membelajarkan dalam mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

2. Sasaran, Pendekatan, Prinsip, dan Strategi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

a. Sasaran Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2.

Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi :

- 1) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2.
- 2) Minimal 30% peminjam adalah perempuan.
- 3) Para peminjam dari rumah tangga miskin telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.
- 4) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin berkelanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil channelling dengan kebijakan pinjaman

b. Pendekatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui :

- 1) Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan di tingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi msyarakat miskin.
- 2) Transparasi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.

- 3) Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
- 4) Menggunakan sistem tanggung ranteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM).
- 5) Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

c. Prinsip Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM/UPK antara lain :

- 1) Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan.
- 2) Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan.
- 3) Pengelola pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.
- 4) Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK

sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM.

- 5) Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan.
- 6) Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan.
- 7) UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai.
- 8) UPK mendapat pengawalan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk oleh proyek.

d. Strategi Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain :

- 1) Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanjutan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan.
- 2) Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap.
- 3) Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja

sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk.

- 4) Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimal yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator utama untuk melihat kinerja pinjaman bergulir adalah LAR, PAR, Rol dan CCr.
- 5) Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai kriteria minimal, dan menutup UPK yang gagal mencapai kinerja minimal dalam waktu satu tahun setelah penundaan.
- 6) Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak.
- 7) Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelola Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir.
- 8) Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya
- 9) LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan

pinjaman serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur laki-laki dan perempuan.

- 10) LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dananya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK.
- 11) LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan di luar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KPM.
- 12) Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar intensif pegawai dan biaya operasional UPK.
- 13) Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain ; pengenalan nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, cash flow sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang sudah ada.
- 14) LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang fokus pada berkelanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya,

yang antara lain terdiri dari : *Cost of Fund* (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan.⁴¹

3. Prosedur Mekanisme Penyaluran Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Kegiatan Dilihat Dari Sisi Masyarakat Penerima Dana Pinjaman Bergulir

a. Tahap Pengajuan Pinjaman

Dalam mengajukan bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, berkas-berkas yang terdiri dari berita acara, surat pernyataan, fotocopy KTP dan berkas penhajuan kredit telah diisi secara benar dan lengkap. Pihak KSM peminjam yang mengajukan kredit datang ke kantor Balai Desa Purwodadi dimana UPK berada, dengan membawa persyaratan-persyaratan pengajuan kredit. Kredit PNPM Mandiri Perkotaan termasuk jenis kredit produktif dan kredit tanpa jaminan dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Calon debitur dalam hal ini masyarakat desa Purwodadi yang sebelumnya telah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK), mengajukan proposal yang selanjutnya diserahkan kepada petugas UPK.

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Pemeriksaan pinjaman dilakukan setelah berkas-berkas pengajuan kredit diperiksa. Pemeriksaan ini meliputi tahap wawancara

⁴¹ Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya.

dan survey langsung ke lokasi KSM peminjam untuk mencocokkan hasil wawancara dan berkas dengan kondisi yang ada.

Pada tahap pemeriksaan petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kemudian permohonan pinjaman dicatat dalam buku Register Permohonan Pinjaman, yang lampirannya diterima dan dipegang oleh ketua KSM. Petugas pinjaman UPK dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan masing-masing anggota KSM dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, manager UPK dan koordinator BKM membuat keputusan apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak dan menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan pinjaman.

c. Tahap Putusan (Persetujuan atau Penolakan) Pinjaman

Dalam pengajuan permohonan kredit oleh KSM kepada UPK ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan kredit dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penolakan permohonan kredit dilakukan apabila permohonan kredit dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya hasil dari usaha dianggap kurang mampu untuk membayar angsuran, serta jenis usaha, dan karakteristik masing-masing anggota KSM.

Setelah UPK bagian pinjaman dan LKM melakukan

pemeriksaan ke rumah masing-masing anggota KSM, manager UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan pinjaman dari petugas UPK.

Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat masalah, manager UPK dan koordinator BKM memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan BKM, yang selanjutnya menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya. Semua ini menyatakan bahwa usulan pinjaman KSM telah disetujui, yang selanjutnya menuju tahap realisasi pinjaman dan bila tidak lolos dalam tahap pemeriksaan, UPK mengembalikan proposal milik KSM yang bersangkutan yang berarti pengajuan pinjaman KSM itu ditolak.

Pada praktiknya di Desa Purwodadi, ketentuan akan diterima atau tidaknya pengajuan permohonan ditentukan dari kelancaran angsuran pada pinjaman periode sebelumnya. Meskipun anggota KSM mempunyai usaha yang jika diukur kurang mampu untuk membayar angsuran, tetapi jika pada kenyataannya anggota tersebut mampu, maka UPK akan menerima permohonan kredit yang diajukan.⁴²

d. Tahapa Realisasi atau Pencairan Pinjaman

Setelah mendapatkan persetujuan kemudian pihak UPK memberikan berkas kepada KSM untuk ditandatangani anggota. Setelah lengkap menandatangani berkas-berkas, baru masing-masing anggota memperoleh uang tunai tentunya terdapat suatu potongan

⁴² Wawancara dengan Ibu Ning, pembantu Unit Pengelola Keuangan (UPK) Desa Purwodadi.

biaya, yaitu biaya provisi dan administrasi.

Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus, manager UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman.

Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK, yang akhirnya uang pinjaman diserahkan kepada masing-masing anggota KSM. Pada saat menerima uang itu, juga merupakan tanggal jatuh tempo KSM melakukan angsuran pinjaman.

e. Tahap Pembinaan Peminjam

Pembinaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah realisasi. Pembinaan dilakukan untuk mengetahui apakah usaha masih berjalan, perkembangan usaha serta membantu menyelesaikan masalah terhadap usaha masing-masing anggota KSM. Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya masalah jika sewaktu-waktu terjadi kemacetan angsuran.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan

pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 (satu) bulan setelah realisasi pinjaman ke tempat usaha peminjam.

Kunjungan dan pembinaan kepada peminjam di bulan pertama setelah realisasi dilakukan untuk mengetahui lebih awal apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat masalah pada peminjam.

f. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman

Pihak KSM setelah menerima kredit berkewajiban melunasi kewajibannya dengan cara mengangsur. Angsuran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau dengan 3 (tiga) kali angsuran. Jadi setiap satu bulan sekali KSM harus datang ke Balai Desa Purwodadi untuk menyetor angsuran berupa pokok dan bunga sebesar 2% setiap bulan dan disetorkan kepada UPK.

Pada tanggal jatuh tempo pembayaran ketua KSM datang ke Kantor UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM dan kartu tabungan KSM untuk disetorkan kepada UPK bagian pinjaman. Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib

mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan pada tanggal jatuh tempo kredit sesuai plafon kredit yang disepakati.

Bagi anggota yang telat dalam pembayaran angsuran, tidak ada sanksi khusus. Sesama anggota KSM lah yang bekewajiban untuk saling mengingatkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴³ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁴ Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah KSM yang mengikuti Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang terletak di Desa Purwodadi Kembaran Banyumas. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, dan berupaya menarik realitas sosial ilmu itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu.⁴⁵

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 7.

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 68.

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel *independen* (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen*⁴⁶. Variabel *independen* yang digunakan dalam skripsi ini yakni Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi.
2. Variabel *dependen* (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas⁴⁷. Variabel *dependen* yang digunakan yakni anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dianggap sebagai masyarakat miskin.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁸ Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber pada anggota KSM mengenai peranan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 38.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi, dan dari internet.

Buku yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku tentang pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵⁰ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵¹

Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 91.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 100.

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

perilaku tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan panca indra. Selanjutnya catatan tersebut dianalisis.⁵²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat dan aktifitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh anggota KSM, dengan mengadakan pengamatan di tengah masyarakat, untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.⁵³

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi BKM, bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan anggota KSM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; serta pertanyaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pemberdayaan masyarakat yang dilakukan anggota KSM.

Selain itu, metode wawancara juga penulis gunakan untuk mengetahui seberapa penting peran Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan untuk membantu perekonomian masyarakat dan seberapa jauh pemahaman dan antusiasisme masyarakat terhadap Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

⁵² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I. (Jakarta : Granit, 2005), hlm. 70.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Jogjakarta : Andi, 2004), hlm. 218.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Fasilitator Kelurahan tingkat Kecamatan, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), ketua Unit Pengelola Keuangan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁴ Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau laporan keuangan dari UPK.⁵⁵

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Metode Kualitatif Deskriptif

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁶ Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan aktivitas kegiatan perberdayaan ekonomi masyarakat anggota KSM Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dan menganalisis data yang berupa pertanyaan-pertanyaan, keterangan yang bukan berupa angka.

2. Metode Analisis SWOT

Metode analisis SWOT merupakan metode analisis data yang menunjukkan bahwa kinerja kebijakan dapat ditentukan oleh kombinasi

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 240.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

faktor eksternal dan internal yakni faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).⁵⁷

Dari berbagai komponen yang ada pada metode analisis SWOT, akan diidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).⁵⁸ Sehingga dapat ditentukan langkah kebijakan yang dapat diambil guna mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta strategi yang digunakan dalam mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang ada di dalam anggota kelompok KSM. Berikut ini adalah tabel langkah penentuan kinerja kebijakan metode analisis SWOT⁵⁹:

Tabel 3.1 : Rancangan Strategi Berdasarkan SWOT

Internal Eksternal	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal.	WEAKNESS (W) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal.	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
THREATS (T) Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal.	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi semua ancaman.	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari semua ancaman.

⁵⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

⁵⁸ Freddy Ranguti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 18.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 203.

Tabel diagram SWOT di atas, menunjukkan tiga langkah dalam penentuan kinerja kebijakan metode analisa SWOT, yakni tahap evaluasi data internal dan eksternal perusahaan, tahap pembuatan matriks SWOT serta tahap pengambilan keputusan.⁶⁰ Melalui metode ini, akan menghasilkan strategi lanjutan sebagai bentuk strategi pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan optimalisasi usaha pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan pada anggota KSM.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 203.



BAB IV

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PURWODADI KEMBARAN BANYUMAS

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Desa Purwodadi merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Kembaran yang memiliki luas wilayah 113.210 Ha dan berada di ketinggian 75,6 m dari permukaan air laut dengan keadaan daerah yang termasuk dataran rendah, dengan kondisi tanah yang subur dan suhu udara rata-rata 27 derajat celcius. Sedangkan batas wilayah Desa Purwodadi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sambeng Kulon

Sebelah Selatan : Desa Pliken

Sebelah Timur: Desa Karang Tengah

Sebelah Barat : Desa Kembaran

Desa Purwodadi terbagi menjadi 2 dusun yaitu dusun I dan dusun II dengan 8 RT dan 2 RW. Pemanfaatan tanah di Desa Purwodadi adalah sebagian besar luas tanah merupakan tanah persawahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah tegalan	: 26 Ha
Tanah sawah	: 86,91 Ha
Tanah perkebunan	: 3 Ha
Tanah kas desa	: 17,4 Ha

2. Keadaan Demografi

a. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Purwodadi pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 1.647 jiwa yang terhimpun dalam 453 KK. Untuk lebih jelasnya perincian keadaan penduduk Desa Purwodadi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Purwodadi Tahun 2011⁶¹

No	Kelompok Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	0-4 Tahun	150	9,24
2	5-9 Tahun	135	8,32
3	10-14 Tahun	155	9,55
4	15-19 Tahun	130	8,01
5	20-24 Tahun	99	6,1
6	25-29 Tahun	120	7,39
7	30-34 Tahun	139	8,56
8	35-39 Tahun	135	8,32
9	40-44 Tahun	129	7,96
10	45-49 Tahun	107	6,59
11	50 Tahun keatas	323	19,91
	Jumlah	1.622	100

b. Jenis Mata Pencaharian

Jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Purwodadi sejumlah 453 KK, dengan menggantungkan hidup pada mata

⁶¹ Buku Laporan Sistem Informasi Profil Daerah Semester I Tahun 2010.

pencapaian yang berbeda-beda, dimana mayoritas mata pencapaian masyarakat Desa Purwodadi adalah sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencapaian Tahun 2011.⁶²

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani Sendiri	160	24,13
2	Buruh Tani	80	12,06
3	Nelayan	-	0
4	Pengusaha	9	1,37
5	Buruh Industri	159	23,98
6	Buruh Bangunan	123	18,55
7	Pedagang	36	5,43
8	Pengangkutan	8	1,20
9	PNS	52	7,84
10	ABRI	1	0,15
11	Pegawai BUMN/D	1	0,15
12	Pensiunan	32	4,83
13	Penggalian	-	0
14	Jasa Sosial	2	0,30
	Jumlah	663	100

Sumber : Monografi Desa Purwodadi 2011

c. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan dari masyarakat Desa Purwodadi sangat kompleks, sebesar 673 orang berpendidikan tamat SD yang merupakan pendidikan kebanyakan dari seluruh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Purwodadi berdasar pada kelompok tingkat pendidikan.

⁶² Buku Laporan Sistem Informasi Profil Daerah Semester I Tahun 2010.

Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Sekolah	3	0,26
2	Tidak tamat SD	66	5,8
3	Tamat SD	673	59,13
4	Tamat SLTP	236	20,74
5	Tamat SLTA	132	11,6
6	Tamat Perguruan tinggi	28	2,46
	Jumlah	1.138	100

d. Agama

Masyarakat Desa Purwodadi mayoritas memeluk agama Islam yakni sebesar 1.616 orang. Berikut fakta yang disajikan dalam tabel :

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Purwodadi Tahun 2011

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Islam	1.616	99,9
2	Katolik	1	0,1
3	Protestan	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
6	Lain-Lain	0	0
	Jumlah	1.617	100

3. Sosial dan Ekonomi

a. Sosial Kemasyarakatan

Dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dan masyarakat serta institusi-institusi yang memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, maka kehidupan warga masyarakat Desa Purwodadi selalu dalam keadaan damai, tertib, dan aman. Kegiatan keasyarakatan yang ada di

masyarakat diantanya perkumpulan PKK yang rutin diadakan oleh ibu-ibu setiap bulan. Kemudian untuk kegiatan remaja, para pemuda mempunyai wadah kegiatan karang taruna.

b. Sosial Politik

Pembinaan sosial politik masyarakat Desa Purwodadi sampai saat ini berjalan dengan baik berkat kerjasama antara aparat desa, BPD dan pemuka masyarakat. Keadaan suhu politik dari Desa Purwodadi tergolong stabil dan terkendali.

Aparat desa yang terdiri dari 11 orang adaah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam menjalankan tugasnya saling bekerjasama sesuai dengan petunjuk aturan yang ada, dan didampingi oleh BPD yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta ada lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

c. Sosial Budaya

Sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan di Desa Purwodadi sudah mulai terolah dan terkoordinir dalam wadah organisasi, dimana organisasi dalam bidang kebudayaan dan kesenian dijadikan wadah kreasi masyarakat yang diharapkan dapat berkembang dimasa yang akan datang. Organisasi kebudayaan dan kesenian yang ada saat ini adalah grup kesenian rebana yang secara rutin melakukan pertemuan setiap minggunya. Kebudayaan dan kesenian tersebut

terbina dengan baik yang pada pada setian minggu diadakan latihan rutin, baik itu dari golongan laki-laki maupun perempuan.

d. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi masyarakat Desa Purwodadi terfokus pada pertanian, mengingat sumber daya alam bidang pertanian yang melimpah dan sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Purwodadi menggantungkan dibidang pertanian. Oleh sebab itu pembangunan pertanian di Desa Purwodadi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

Untuk meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, pemerintah secara rutin memperbaharui saluran irigasi untuk memperlancar aliran air yang disalurkan untuk mengalir sawah.

B. Aktifitas Pemberdayaan Ekonomi Pada Anggota KSM Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas

Kegiatan program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam segi permodalan. Dimana usaha yang dijalankan oleh masyarakat diharapkan mampu membantu keuangan keluarga guna mendapatkan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Ada banyak macam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Mayoritas, pemberdayaan yang dilakukan secara individu dilakukan dengan membuka

usaha perdagangan. Baik yang baru memulai atau meneruskan usaha yang sudah pernah dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh ibu Munjiah salah satu anggota KSM Mekar Sari yang membuka usaha warung dengan menambah modal dari pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan. Ibu Munjiah menambahkan bahwa adanya program pinjaman bergulir ini, cukup membantu untuk menambah modal usahanya, sehingga volume investasi usahanyapun dapat ditingkatkan dengan harapan dapat menambah penghasilan dari usaha yang dijalankannya tersebut. Hal yang dilakukan oleh Ibu Munjiah, sama juga dilakukan oleh beberapa anggota KSM lainnya yang membuka usaha warung.

Selain usaha warung, ada juga usaha pemeliharaan ikan lele untuk konsumsi yang dilakukan oleh Bapak Irin. Konsepnyapun sama yang dilakukan oleh Ibu Munjiah, yakni menambahkan modal usaha dari pinjaman yang diperoleh dari program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Disamping pemberdayaan yang dilakukan secara individu, ada juga masyarakat yang melakukannya secara berkelompok. Diantaranya yaitu KSM Bordir yang melakukan usaha konveksi secara bersama-sama, dengan modal tambahan dari program pinjaman bergulir serta melakukan usaha tersebut secara bersama-sama pula. Menurut salah satu anggotanya, yaitu Ibu Tri Juwanti, kelompok ini dibentuk bagi yang tidak menjalankan usaha warung, juga yang mempunyai kemampuan menjahit. Menurut Ibu Tri Juwanti, kegiatan ini juga membantu pemasukan keluarganya dan keluarga anggota KSM Bordir. Pelatihan lain yang diselenggarakan guna mendukung program

ini yakni pelatihan sablon yang juga di sertai dengan pembelian peralatan sablon juga ruko sebagai tempat produksi.

Dari pihak PNPM Mandiri Perkotaan, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Purwodadi juga mengadakan pelatihan ketrampilan yang diperuntukkan bagi anggota KSM, diantaranya ketrampilan sablon, menjahit, dan membuat peralatan pertukangan. Pada tujuannya, pelatihan ketrampilan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bagi anggota yang tidak atau belum mempunyai usaha warung dan bagi anggota yang ingin membuka usaha tetapi belum mempunyai ketrampilan yang lebih khusus.

Salah satunya yaitu Ibu Anip yang sekarang menjalankan usaha makanan ringan yang berasal dari pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Menurut Ibu Anip yang diwawancarai, usaha ini sangat membantu pemasukan keuangan baginya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Hingga saat ini, usaha yang dijalankan oleh Ibu Anip sudah berkembang cukup pesat.

C. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan di Purwodadi Kembar Banyumas

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pembangunan sistem serta

mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan. Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program yang dilakukan dalam upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengurangi kemiskinan berupa akses dan jasa layanan keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga miskin dan memberikan pengajaran dalam mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.⁶³

Visi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan visi dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Purwodadi yakni agar masyarakat lebih berdaya menuju kemandirian dengan kerjasama semua pihak dalam penanggulangan kemiskinan dengan perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan dengan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang ada. Misi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk

⁶³ Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya.

menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan mengembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Sedangkan misi dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Purwodadi adalah peningkatan kemampuan aparatur desa dalam membantu memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kemiskinan; mendorong kaum perempuan aktif dan berbagi peran dengan kaum laki-laki dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan; dan peningkatan kapasitas segenap elemen msayarakat untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan cara mandiri dan penyadaran kritis terhadap potensi dan permasalahan yang ada.⁶⁴

Program yang direncanakan dalam Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yakni berupa penyaluran bantuan pinjaman modal bagi masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menjalankan usaha secara individu atau secara kelompok dengan memanfaatkan bantuan pinjaman modal tersebut. Dalam program kerjanya, Selain bantuan pinjaman modal, PNPM juga mengadakan pelatihan ketrampilan juga memberikan pengadaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha bersama. Salah satu pengadaan barang modal yang dilakukan adalah pengadaan barang berupa mesin jahit dan bordir yang dikelola secara kelompok oleh anggota.

⁶⁴ Diolah dari wawancara dengan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Bapak Chajat pada 25 November 2013.

Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan mampu membantu kondisi ekonomi masyarakat miskin dengan bantuan pinjaman modal agar masyarakat dapat menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan dalam rangka menambah pendapatan keluarga. Selain program Pinjaman bergulir, bantuan berupa pengadaan pelatihan dan pengadaan alat juga dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini diharapkan pinjaman modal yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan benar dengan mengelola bantuan barang modal yang sudah diberikan. Bagi masyarakat yang belum mempunyai ketrampilan dapat menggali kemampuannya dengan mengikuti pelatihan yang diadakan sehingga dapat membuka dan menjalankan usaha baru.

Program kerja pnpm mandiri sejalan dengan pandangan Britha Mikkelsen dalam buku *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* bahwa pada permulaan tahun 1990-an, Bank Dunia menghidupkan kembali perhatiannya terhadap kemiskinan, dengan demikian mengembalikan tema-tema yang menjadi ciri strategi Bank Dunia dalam tahun 1970-an, yaitu "redistribusi pertumbuhan" dan "kebutuhan pasar". Sebagai hasilnya, laporan Pembangunan Bank Dunia tahun 1990 menyajikan strategi baru untuk mengurangi kemiskinan. Strategi Bank Dunia mengumpulkan masalah-masalah lama mengenai pengentasan kemiskinan dalam kerangka baru dan dengan demikian menghasilkan suatu agenda yang berguna untuk pembahasan selanjutnya. Agenda kemiskinan yang baru ini terdiri dari tiga bagian : (1) membuka kesempatan ekonomi untuk golongan miskin :

mengembangkan pertumbuhan padat-karya dan meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan para petani kecil; (2) investasi dalam sumber daya manusia : memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin, terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian : program-program Aksi Sosial diganti dengan Dana-Dana Sosial, yakni dana pemerintah untuk menunjang jaring pengaman informal. Strategi rangkap tiga Bank Dunia memperoleh dukungan luas dari badan-badan pembangunan multilateral dan bilateral.⁶⁵

Menurut analisis penyusun, program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan karena bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin secara langsung yang sudah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk membuka atau mengembangkan usaha yang akan atau sudah dijalani. Sehingga pendapatan tambahan yang diperoleh dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya masih tergolong sebagai keluarga miskin. Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin karena kemudahan yang syarat yang diberikan, diantaranya yakni tidak adanya jaminan barang yang harus diberikan oleh anggota, jika pada kredit usaha rakyat yang ada pada lembaga keuangan, ada syarat-syarat khusus yang harus disediakan oleh nasabah

⁶⁵ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 197-198.

misalnya harus adanya surat izin usaha, surat jaminan pinjaman, pada Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan tidak diberlakukan. Syarat yang diberlakukan hanya fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan sudah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Seperti yang dijalani oleh saah satu anggota KSM Ibu Tri Juanti, yakni menjalankan usaha kelompok berupa jasa jahit dan bordir yang peralatannya juga merupakan bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Sebelumnya Ibu Tri Juanti hanya seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan penghasilan suami sebagai buruh tani, dengan ketrampilan yang dimiliki dan bantuann yang telah diberikan, Ibu Tri Juanti kini sudah mempunyai penghasilan tambahan dari usaha kelompok yang dijalaninya bersama anggota KSM yang lainnya sekarang. Manfaat yang sama juga dirasakan oleh anggota KSM yang lainnya, yakni berupa tambahan penghasilan dari usaha dengan tambahan bantuan modal yang telah diberikan pada Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

D. Analisis SWOT Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas

1. Analisis Faktor Internal

Berikut faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakess*) pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap faktor internal Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas, antara lain :

Tabel 4.5 : Daftar Kekuatan dan Kelemahan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi.

Komponen	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Kedisiplinan Pengembalian Pinjaman	- Adanya sistem tanggung renteng dimana jika ada satu anggota yang tidak dapat memberikan angsuran maka anggota yang lainnya akan membantu melunasi angsurannya. - Saling mengingatkan antar anggota jika pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ada salah satu anggota yang belum menyetorkan angsuran kepada ketua KSM.	- Masih adanya beberapa anggota yang kurang sadar tentang pentingnya kedisiplinan dalam pembayaran angsuran.
Kelangsungan Usaha	- Bagi anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, hal ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi usaha yang sedang dijalannya. - Dengan adanya kucuran modal, anggota yang mempunyai keahlian dapat terbantu untuk mendirikan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki.	- Bagi anggota yang hanya berawal dari mengikiti pelatihan yang diadakan oleh PNPM-PK, kurang adanya kerja keras dalam memulai dan kembangkan usaha yang sedang dijalannya. - Usaha yang dijalankan hanya mengandalkan konsumen lokal, dan tidak berusaha mencari lokasi yang sekiranya dapat menjaring konsumen yang lebih banyak lagi.

SDM, meliputi : - Anggota - Pendidikan - Keahlian	- Anggota KSM yang cukup mempunyai keahlian untuk dapat mengembangkan atau memulai usaha.	- Pasifnya anggota dalam menjalankan usaha baru. - Kurangnya kreatifitas anggota dalam memulai usaha, dan hanya mengikuti atau meniru usaha anggota lain yang sudah ada.
--	---	---

2. Analisis Faktor Eksternal

Berikut faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap faktor eksternal Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas, antara lain :

Tabel 4.6 : Daftar Peluang dan Ancaman Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi.

Komponen	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Persaingan Usaha	Jauhnya jarak lokasi desa dari pusat pasar sehingga dapat menjadikan peluang untuk menciptakan pasar baru untuk konsumen lokal.	Banyaknya anggota yang mempunyai usaha yang serupa dan hanya mengandalkan konsumen lokal.
Pemerintah	Adanya perhatian penuh dari pemerintah desa untuk melancarkan usaha anggota dalam rangka penanggulangan kemiskinan.	Perubahan peraturan seiring dengan perubahan kondisi politik daerah.
Teknologi	Perkembangan teknologi dan transportasi yang pesat di zaman modern.	Teknologi yang semakin canggih menggerus tenaga manusia untuk

		menjalankan suatu produksi
Konsumen	Setiap konsumen pasti membutuhkan barang-barang pokok yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.	Konsumen semakin sensitif terhadap harga

3. Matrik SWOT Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas

Dari berbagai komponen-komponen analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas, maka formulasi dari perpauan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 : Matriks Analisis SWOT Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas

INTERNAL	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	1. Adanya sistem tanggung renteng dimana jika ada satu anggota yang tidak dapat memberikan angsuran maka anggota yang lainnya akan membantu melunasi angsurannya. 2. Saling mengingatkan antar anggota jika pada saat jatuh tempo	1. Masih adanya beberapa anggota yang kurang sadar tentang pentingnya kedisiplinan dalam pembayaran angsuran. 2. Bagi anggota yang hanya berawal dari mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PNPM-PK, kurang adanya kerja keras dalam memulai dan

EKSTERNAL	pembayaran angsuran ada salah satu anggota yang belum menyetorkan angsuran kepada ketua KSM. 3. Bagi anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, hal ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi usaha yang sedang dijalannya. 4. Dengan adanya kucuran modal, anggota yang mempunyai keahlian dapat terbantu untuk mendirikan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki. 5. Anggota KSM yang cukup mempunyai keahlian untuk dapat mengembangkan atau memulai usaha.	kembangkan usaha yang sedang dijalannya. 3. Usaha yang dijalankan hanya mengandalkan konsumen lokal, dan tidak berusaha mencari lokasi yang sekiranya dapat menjaring konsumen yang lebih banyak lagi. 4. Pasifnya anggota dalam menjalankan usaha baru. 5. Kurangnya kreatifitas anggota dalam memulai usaha, dan hanya mengikuti atau meniru usaha anggota lain yang sudah ada.
Peluang (Opportunities) 1. Jauhnya jarak lokasi desa dari pusat pasar sehingga dapat menjadikan peluang untuk menciptakan pasar baru untuk konsumen lokal. 2. Adanya perhatian penuh dari pemerintah desa untuk melancarkan usaha anggota	Sel A (Manajemen SO) 1. Setiap anggota bisa mengikuti program pinjaman bergulir sehingga mempunyai kesempatan meningkatkan investasi usahanya, atau dapat membuka usaha baru. Misalnya : membuka usaha warung sembako. (S3, S4, S5, O1, O4). 2. Anggota yang mempunyai keahlian khusus bisa	Sel B (Manajemen WO) 1. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk mendirikan usaha kebutuhan bahan pokok. (W2, W4, O2, O4). 2. Memasarkan barang produksi ke luar daerah Desa Purwodadi. (W4, W3, O3, O4). 3. Peningkatan kualitas SDM dengan kagiatan pelatihan yang diadakan oleh

dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 3. Perkeembangan teknologi dan transportasi yang pesat di zaman modern. 4. Setiap konsumen pasti membutuhkan barang-barang pokok yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari	menciptakan usaha baru atau bahkan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar dan memasarkannya di luar lingkungan desa, dengan bantuan tambahan modal dari program pinjaman bergulir. Misalnya : membuka usaha jajanan pasar dan menjualnya ke pusat pasar di kota. (S4, S5, O3, O4).	pemerintah. (W2, W5, O2, O3).
Ancaman (Threats) 1. Banyaknya anggota yang mempunyai usaha yang serupa dan hanya mengandalkan konsumen lokal. 2. Perubahan peraturan seiring dengan perubahan kondisi politik daerah. 3. Teknologi yang semakin canggih menggerus tenaga manusia untuk menjalankan suatu produksi. 4. Konsumen semakin sensitif terhadap harga	Sel C (Manajemen ST) 1. Meningkatkan investasi usaha dan meningkatkan kualitas produk yang diperdagangkan yang sudah dijalankan. (S3, S4, T2, T3, T4). 2. Membuka usaha baru yang sekiranya belum pernah dijalankan atau belum ada di lingkungan Desa Purwodadi. (S4, S5, T1, T4)	Sel D (Manajemen WT) 1. Mencari pasar di luar pasar lokal. Misalnya menjual barang produksi ke luar daerah Desa Purwodadi. (W2, W3, W4, W5, T3, T4). 2. Menciptakan produk baru atau meniru produk baru yang sedang tren dan belum ada yang memasarkan di daerah Desa Purwodadi. (W5, T1).

Matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, an Threats*)

bertujuan menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yakni kombinasi strategi SO, ST, WO, dan WT, yakni yang dirinci sebagai berikut:

a. Sel A (*Strengths-Opportunities Strategy*)

- 1) Setiap anggota bisa mengikuti program pinjaman bergulir sehingga mempunyai kesempatan meningkatkan investasi usahanya, atau dapat membuka usaha baru. Misalnya : membuka usaha warung sembako.
- 2) Anggota yang mempunyai keahlian khusus bisa menciptakan usaha baru atau bahkan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar dan memasarkannya di luar lingkungan desa, dengan bantuan tambahan modal dari program pinjaman bergulir. Misalnya : membuka usaha jajanan pasar dan menjualnya ke pusat pasar di kota.

b. Sel B (*Weakness-Opportunities Strategy*)

- 1) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk mendirikan usaha kebutuhan bahan pokok.
- 2) Memasarkan barang produksi ke luar daerah Desa Purwodadi.
- 3) Peningkatan kualitas SDM dengan kagiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

c. Sel C (*Strengths-Threats Strategy*)

- 1) Meningkatkan investasi usaha dan meningkatkan kualitas produk yang diperdagangkan yang sudah dijalankan.

- 2) Membuka usaha baru yang sekiranya belum pernah dijalankan atau belum ada di lingkungan Desa Purwodadi.

d. *Sel D (Weakness-Threats Strategy)*

- 1) Mencari pasar di luar pasar lokal. Misalnya menjual barang produksi ke luar daerah Desa Purwodadi.
- 2) Menciptakan produk baru atau meniru produk baru yang sedang tren dan belum ada yang memasarkan di daerah Desa Purwodadi.

Hasil analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran memerlukan tiga bentuk pengembangan untuk mengoptimalkan perannya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tiga bentuk pengembangan tersebut yaitu :

1. Pengembangan kualitas dan kuantitas produk baru, meliputi :
 - a. Pengembangan variasi produk yang diperjual belikan yang lebih mengancu pada kebutuhan pokok masyarakat.
 - b. Pengembangan jenis produk tambahan. Misalnya : penyediaan jasa fotocopy, konveksi jahit.
 - c. Menambah volume barang yang diperjualbelikan
2. Metode produksi baru. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dalam memproduksi suatu barang. Dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih.

3. Pangsa pasar baru.

- a. Perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan transportasi. Misalnya : memasarkan produk di luar Desa Purwodadi.
- b. Melakukan pemasaran dengan pendekatan komunitas tertentu. Misalnya : membuatkan seragam TK.
- c. Adanya fasilitas dari pemerintah dalam melancarkan usaha baru atau pengembangan usaha perdagangan. Misalnya : fasilitas penyewaan ruko dengan harga terjangkau di tempat yang strategis.

E. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Peningkatan Optimalisasi Usaha Sebagai Strategi Lanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Pada Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi telah mampu mengurangi kesenjangan potensi masyarakat dengan memproduktifkan masyarakat yang belum atau kurang produktif, artinya, bagi masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum mempunyai usaha tambahan diharapkan mempunyai keinginan untuk mendayagunakan kemampuan yang dimiliki dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, menggali potensi masyarakat dan meningkatkan usaha mikro masyarakat. Melihat hal ini, Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki prospek untuk lebih optimal

dalam usaha membedakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi lanjutan bagi pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran program ini.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dipaparkan di atas, terdapat tiga bentuk pengembangan yang diperlukan oleh anggota KSM Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi untuk mengoptimalkan peranannya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya :

1. Pengembangan kualitas dan kuantitas produk baru, meliputi :
 - a. Pengembangan variasi produk yang diperjual belikan yang lebih mengacu pada kebutuhan pokok masyarakat.
 - b. Pengembangan jenis produk tambahan. Misalnya : penyediaan jasa fotocopy, konveksi jahit.
 - c. Menambah volume barang yang diperjualbelikan.
2. Metode produksi baru. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dalam memproduksi suatu barang. Dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih.
3. Pangsa pasar baru.
 - a. Perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan transportasi. Misalnya : memasarkan produk di luar Desa Purwodadi.
 - b. Melakukan pemasaran dengan pendekatan komunitas tertentu. Misalnya : membuatkan seragam TK.

- c. Adanya fasilitas dari pemerintah dalam melancarkan usaha baru atau pengembangan usaha perdagangan. Misalnya : fasilitas penyewaan ruko dengan harga terjangkau di tempat yang strategis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disusun simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas Terhadap Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan karena bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin secara langsung yang sudah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk membuka atau mengembangkan usaha yang akan atau sudah dijalani. Sehingga pendapatan tambahan yang diperoleh dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya masih tergolong sebagai keluarga miskin

2. Analisis SWOT Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas

Dalam matrik SWOT dapat dijadikan rujukan bagi pembina KSM dalam pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Strategi tersebut antara lain :

- a. Sel A (*Strengths-Opportunities Strategi*) meliputi 1) setiap anggota bisa mengikuti program pinjaman bergulir sehingga mempunyai kesempatan meningkatkan investasi usahanya, atau dapat membuka usaha baru. Misalnya : membuka usaha warung sembako, dan 2) anggota yang mempunyai keahlian khusus bisa menciptakan usaha baru atau bahkan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar dan memasarkannya di luar lingkungan desa, dengan bantuan tambahan modal dari program pinjaman bergulir. Misalnya : membuka usaha jajanan dan menjualnya ke pusat pasar di kota.
- b. Sel B (*Weakness-Opportunities*) meliputi 1) adanya fasilitas dari pemerintah untuk mendirikan usaha kebutuhan bahan pokok, 2) memasarkan barang produksi ke luar daerah Desa Purwodadi, dan 3) peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.
- c. Sel C (*Strengths-Threats Strategi*) meliputi 1) meningkatkan investasi usaha dan meningkatkan kualitas produk yang diperdagangkan yang sudah dijalankan, dan 2) membuka usaha baru yang sekiranya belum pernah dijalankan atau belum ada di lingkungan Desa Purwodadi.
- d. Sel D (*Weakness-Threats Strategi*) meliputi 1) mencari pasar di luar pasar lokal. Misalnya menjual barang produksi ke luar daerah Purwodadi, dan 2) menciptakan produk baru atau meniru produk baru

yang sedang tren dan belum ada yang memasarkan di daerah Desa Purwodadi.

3. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan Di Purwodadi Kembaran Banyumas

Untuk mendukung optimalisasi Program Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan, ada banyak pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat baik yang sudah memiliki keahlian untuk memperdalam, atau bagi yang belum memilikinya. Dengan diadakannya pelatihan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan untuk diperjualbelikan. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada pada masyarakat untuk lebih menciptakan kreatifitas dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya guna mensejahterakan diri dan keluarganya.

Dalam menciptakan suasana usaha yang kondusif dapat dilakukan dengan membangun motivasi dan mendorong anggotanya untuk mengembangkan potensinya dengan tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Sikap pengorbanan dan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan seluruh potensi masyarakat, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, peningkatan efisiensi, dan membantu mendorong kesejahteraan masyarakat

4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Peningkatan Optimalisasi Usaha Sebagai Strategi Lanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Optimalisasi strategi yang dilakukan dalam Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan diantaranya pengembangan kualitas dan kuantitas produk baru, meliputi pengembangan variasi produk yang dihasilkan yang lebih mengacu pada kebutuhan pokok masyarakat sekitar, pengembangan jenis produk tambahan, serta menambah volume barang yang diperjualbelikan. Metode produksi baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan dalam memproduksi suatu barang. Serta pangsa pasar baru meliputi perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan transportasi, melakukan pemasaran dengan pendekatan komunitas tertentu, dan adanya fasilitas dari pemerintah dalam melancarkan usaha baru atau pengembangan usaha perdagangan.

B. Saran-Saran

Dengan kesimpulan yang didapat melalui proses analisis tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tetap melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan dalam membuat strategi kegiatan pemberdayaan di Desa Purwodadi. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan lebih optimal

C. Penutup

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Atas izin kekuasaan-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, kesempurnaan tetap menjadi milik-NYA, penyusun skripsi ini pun masih sangat jauh dari sebuah kesempurnaan, yang merupakan takdir sebagai manusia yang tidak lupa dari luput dari khilaf dan lupa.

Dengan demikian, penyusun senantiasa berharap atas segala kritik dan saran pembaca guna instrokpesi diri penyusun dan sebagai bentuk pelajaran dan pengembangan diri. Hingga akhirnya penyusun ucapkan dengan ketulusan hati ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini. Penulis senantiasa berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan bagi seluruh masyarakat secara umum. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1. Jakarta : Granit, 2005.
- Ahmad, Ziauddin. *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta, 1998
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, *Executive Summary Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2011*, (online : <http://sosekling.pu.go.id/attachment/article/350/Penelitian%20dan%20Pengembangan%20Pengelolaan%20PNPM%20Mandiri.pdf>).
- Buku Laporan Sistem Informasi Profil Daerah Semester I Tahun 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan Ketiga. Jakarta : Kencana, 2009.
- Damanhuri, Didin S. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor : PT Penenrbit IPB Press, 2010.
- Data Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Habitat for Humanity Australia. *Poverty Housing Fact Sheet*. (Online) : <http://www.habitat.org.au/document.doc?id=120> diakses pada 23 Januari 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Jogjakarta : Andi, 2004.
- <http://andifachriani.blogspot.com/2012/01/kemiskinan-dan-faktor-penyebabnya.html>.

<http://pnpm-mandiri.org>

<http://satelitnews.co/2013/01/17/warga-miskin-di-banyumas-alami-penurunan>.

Kamaluddin, Rustian. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Maskun, Sumitro. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Media Widya Mandala, 1995.

Maya Putri Kirana, *Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat*, Departemen Ilmu Kesehatan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2012, (online : <http://responitory.ucu.ac.id/handle/123456789/34690>).

Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.

Nurul Choiriyah, *Makalah Makalah PNPM Mandiri Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pedesaan*, Yogyakarta, 2011, (online : <http://dhechoiriyah-nurul.blogspot.com/2012/05/makalah-pnpm-mandiri-sebagai-upaya.html>).

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya.

Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Sanjaya Yasin, *Pembaedayaan Masyarakat Pengertian, Proses, Tujuan*, Jurnal Blog Pendidikan Indonesia (online : www.sarjanaku.com, diakses pada 25 November 2013).

Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Soetrisno. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta : Philosophy Press, 2000.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sumidingrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT.Bina Rena Pariwisata, 1996.
- _____. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998
- _____. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Aditya Media, 1996.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Yoni Yulianti, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, 2012, (online : <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PARTISIPASI-MASYARAKAT.pdf>).

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Mulai tahun berapakah Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini ada di Desa Purwodadi?
Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ada di Desa Purwodadi mulai tahun 2008, dan mulai mendapatkan respon positif mulai tahun 2009.
2. Apakah setiap program di PNPM-MK ada program pinjaman bergulir?
Setiap permulaan program selalu ada program pinjaman bergulir, namun untuk kelanjutannya dipertimbangkan dari prosentase tingkat pengembaliannya, jika kurang dari 20% maka bisa terus diajukan ke pusat untuk terus mengadakan program pinjaman bergulir
3. Apa kategori yang ditetapkan sebuah keluarga dianggap miskin? atau kategori itu di musyawarahkan terhadap masyarakat untuk menentukan sendiri?
Kategori yang ditetapkan oleh PNPM-MK tentang keluarga miskin dimusyawarahkan kepada masyarakat di tingkat RT yang kemudian diajukan ke tingkat desa yang akan menjadi kesimpulan dan tolak ukur kriteria keluarga miskin.
4. Bagaimana perkembangan tingkat ekonomi masyarakat setelah adanya program ini?
Jika diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan, tingkat ekonomi masyarakat belum dikatakan memasuki taraf sejahtera, namun dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum mempunyai tambahan penghasilan, terutama bagi para ibu rumah tangga, kini sudah mulai

mendapatkan tambahan penghasilan dengan membuka usaha secara individual ataupun secara berkelompok.

5. Berdasarkan apa kesimpulan yang diambil?

Hal ini dapat dilihat dari anggota KSM yang mengikuti program tersebut kini sudah mempunyai tambahan penghasilan sendiri.

6. Selain pinjaman bergulir yang dilakukan, strategi pemberdayaan apa yang dilakukan oleh pembina untuk mendukung program pinjaman bergulir agar bisa berjalan dengan optimal dan tepat sasaran? dalam bentuk apa?

Selain dalam bentuk bantuan modal, juga ada penyuluhan tentang bagaimana pentingnya mengelola modal agar usaha yang dijalankan tetap stabil dan dapat mengembalikan bantuan modal yang sudah di pinjamkan. Selain itu,

PNPM juga mengadakan pelatihan ketrampilan tertentu secara cuma-cuma bagi anggota atau masyarakat yang mau mengikutinya, misalnya yang sudah pernah dilakukan adalah pelatihan membuat alat rumah tangga, menjahit,

sablon, membuat aneka makanan.

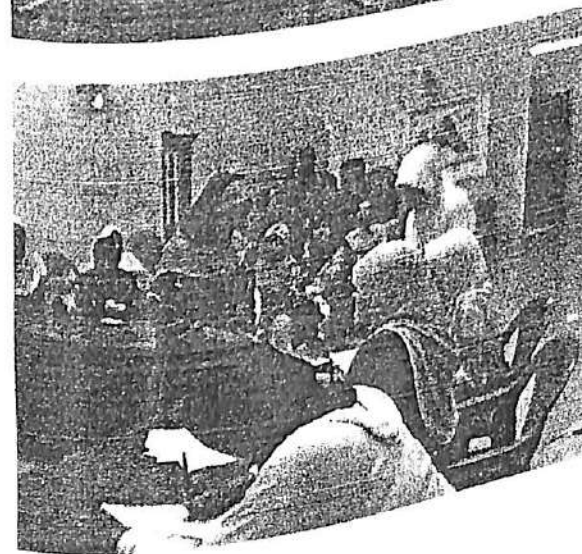
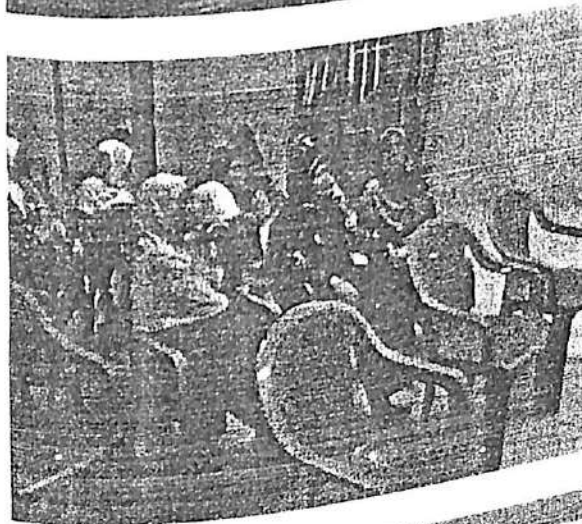
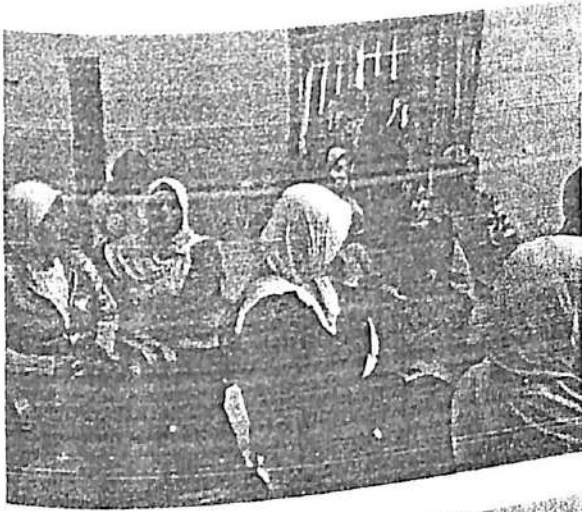
7. Dalam komponen analisis faktor internal dan eksternal

- Internal (SDM, tingkat kedisiplinan pengembalian pinjaman, jenis usaha)
 - SDM : dari segi ketrampilan, SDM yang ada sudah dikatakan cukup mempunyai keahlian untuk dapat mengembangkan usaha atau membuka usaha baru dalam bidang tertentu.
 - Tingkat kedisiplinan pengembalian pinjaman : hanya sebagian kecil anggota yang kurang mempunyai kesadaran kedisiplinan dalam pengambilan pinjaman, namun hal ini dapat diatasi dengan jalan

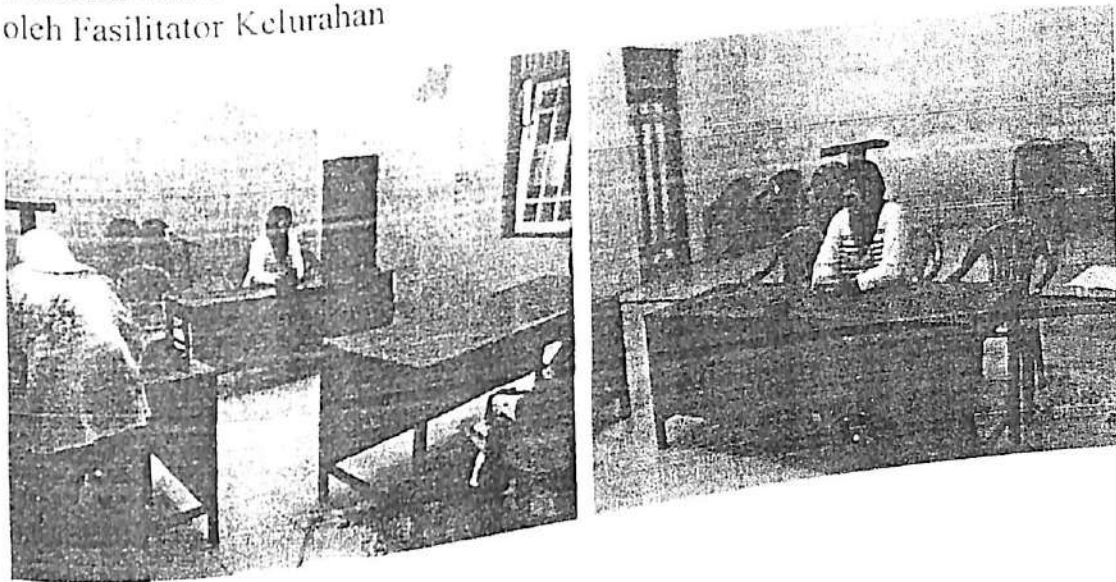
saling mengingatkan antar anggota dan dengan jalan tanggung renteng jika ada anggota yang belum bisa memberikan angsuran pinjaman.

- Jenis usaha yang dijalani merupakan jenis usaha perdagangan barang pokok yang dimana setiap masyarakatpun membutuhkannya.
- Eksternal (persaingan usaha, pemerintah, teknologi, konsumen)

Pencairan dana BLM Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 15
Februari 2013



Sebelum BLM di berikan kepada anggota, terlebih dahulu dilakukan penyuluhan oleh Fasilitator Kelurahan



DAFTAR HADIR

DESA		USIA		ALAMAT	TANDA TANGAN	
NAMA						
1	1	P	44	Purwodadi		1
2	2			Purwodadi		2
3	3			Purwodadi		3
4	4			Purwodadi		4
5	5	P	50	"		5
6	6	P		"		6
7	7	P		"		7
8	8			"		8
9	9			"		9
10	10			"		10
11	11			"		11
12	12			"		12
13	13			"		13
14	14	1		"		14
15	15	2		"		15
16	16					16
17	17					17
18	18					18
19	19					19
20	20					20
21	21					21
22	22					22
23	23					23
24	24					24
25	25					25
26	26					26
27	27					27
28	28					28
29	29					29
30	30					30
31	31					31



AKAD SERAH TERIMA DANA
PNPM-MANDIRI PERKOTAAN
BLM TERMIN II Tahun 2012

KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
LKM
NAMA KSM

Banyuwangi
Kecamatan
Purwodadi
Desa
Meliyut
Meliyut

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H. Chajit, S.Pd
Jabatan : Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
Sumber Rezeki di Desa Purwodadi, bertindak untuk dan
atas nama wakil masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
2. Nama : Daryat
Jabatan : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Meliyut di Desa Purwodadi, bertindak untuk dan
atas nama wakil KSM, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan sesuai dengan usulan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejumlah Rp. 14.700.000 (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari dana BLM PNPM-Mandiri Perkotaan pada Pencairan Termin I yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA melalui kesekretariatan. PIHAK KEDUA siap melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam lampiran SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) BLM dan siap menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA dimaksud tidak mengindahkan segala ketentuan tersebut. Demikian Akad Serah Terima Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Koordinator LKM

PIHAK KEDUA
Ketua KSM

Daryat
baryat

H. Chajit, S.Pd

BERITA ACARA
KEGIATAN

Pencarian Phonomi Bergefit
KSM Mekar Sari & KSM Melati I

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
KMW
Team Fasilitator

Purwodadi
Kembaran
Banyumas
Jawa Tengah
V
TF-10

Pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Paduvaru tahun 2013 pukul 16.30 telah dilaksanakan kegiatan Pencarian Bergefit bertempat di Balai Desa dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (laki-laki : dan perempuan :), dengan hasil sebagai berikut :

1. Pencarian KSM Mekar Sari Rp. 22.000.000
2. Pencarian KSM Melati I Rp. 14.500.000
3.
4.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembaran, 15 Paduvaru 2013
Team Fasilitator

Wakil Peserta

(Trijuwanti)

(Sulastri)

Mengetahui,

(Ning Wastyan)



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

Purwokerto, 19 November 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya PP.00.9/236 /2012
Lamp. : -
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Ketua UPK PNPM Mandiri Kecamatan Kembaran
Di
Purwodadi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)**" maka kami memohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Laeli Adhi Saputri
2. NIM : 082323025
3. Semester : IX (Sembilan)
4. Jurusan/Prodi : Syariah/Ekonomi Islam
5. Tahun Akademik : 2012-2013

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Obyek : Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan
Desa Purwodadi

2. Tempat/Lokasi : Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran
3. Tanggal Penelitian : 20 November 2012 s/d Selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Drs. H. Syafa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1005

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 5 April 2013

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 072/ 2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama	: Laeli Adhi Saputri
NIM	: 082323025
Semester /Prodi	: X / Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2012/2013
Alamat	: Desa Ledug RT 03 RW 05 Kembaran Banyumas
Judul	: Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)

Riset (Penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat/Lokasi	: Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran
Obyek	: Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan
Tanggal Penelitan	: 8 April s/d selesai
Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan Syariah

Drs.H.Syufa'at, M.Ag. f
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua LKM Sumber Rezeki Desa Purwodadi Kembaran Banyumas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Laeli Adhi Saputri

NIM : 082323025

Semester/Prodi : XI / Ekonomi Islam

Perguruan Tinggi : STAIN Purwokerto

Nama tersebut di atas benar-benar telah mengadakan penelitian di LKM tersebut di atas pada tanggal 18 Maret 2013 s/d selesai dengan judul "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas tahun 2009-2011"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 6 Januari 2014
Ketua LKM Sumber Rezeki



Jat. S. Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp (0281) 632548. 632116 Faksimile (0281) 640715

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070.1/ 00323/ IV / 2013

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto; nomor : STI.23/J.Sya /PP.009/072/2013 tanggal : 05 April 2013 perihal : Permohonan Ijin Penelitian
2. surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/582/IV/2013 tanggal : 06 April 2013
- Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pelaksanaannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan
4. Judul Penelitian

LAELI ADHI SAPUTRI

Kedong Longsir RT 03 RW 05 Kec. Kembaran Kabupaten Banyumas

Mahasiswa
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)

5. Bidang
6. Lokasi Penelitian
7. Lama Berlaku
8. Penanggung Jawab
9. Pengikut

Ekonomi Islam

Desa Purwodadi Kec. Kembaran

3 bulan (06 April 2013 s.d. 06 Juli 2013)

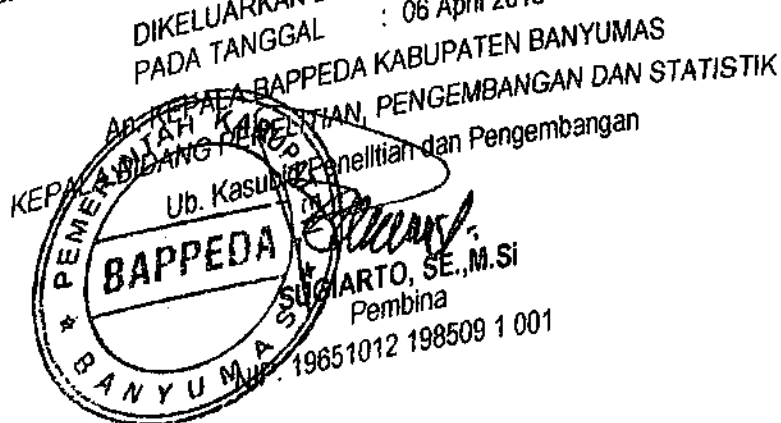
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada wilayah setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 06 April 2013



disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto;
Ketua PNPB Mandiri Perkotaan Kabupaten Banyumas;
Ketua BKM Desa Purwodadi Kabupaten Banyumas;



BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025
Smt/Prodi : IX/Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : H. Sochimim, Lc.,M.Si.
Judul Skripsi : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPMM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011)

No	Hari/Tanggal	Pembahasan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Selasa, 27 November 2012	1. Pengembangan latar belakang masalah. 2. Hal menarik dalam skripsi. 3. Mencari buku tentang teori kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat dan buku panduan Program Pinjaman Bergulir PNPMM. 4. Mencari indikator keberhasilan Program Pinjaman Bergulir PNPMM Mandiri Perkotaan (dilihat dari respon responden atau dari laporan tahunan).		
2	Rabu, 9 Januari 2013	1. Mempersempit kutipan, dan mengembangkannya dengan kalimat sendiri. 2. Mempersempit data pada latar belakang masalah. 3. Mencari rekapitulasi data warga miskin sebelum adanya PNPMM Mandiri dan sesudahnya di Kecamatan Kembaran. 4. Mencari data jumlah anggota KSM.		

Dosen Pembimbing

H. Sochimim, Lc.,M.Si.

NIP. 19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No.40A Tlp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

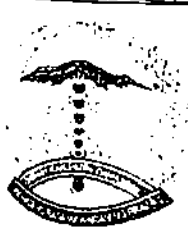
		5. Menjelaskan dalam latar belakang masalah : apakah jumlah anggota KSM yang ada signifikan dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Purwodadi. 6. Menggeneralkan kriteria seluruh anggota KSM mempunyai usaha produksi. 7. Teknik sampling.			
3	Rabu, 30 Januari 2013	1. Menambahkan angka kemiskinan dalam latar belakang masalah. 2. Mencari dasar kategorisasi warga miskin.			
4	Selasa, 5 Februari 2013	1. ACC proposal untuk diseminarkan.			
5	Selasa, 30 April 2013	1. Menambah contoh penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. 2. Menjelaskan keunggulan dari penelitian skripsi terhadap penelitian yang terdahulu. 3. Menjelaskan keterangan gambar dengan lebih ringkas.			
6	Rabu, 20 November 2013	1. Memperbaharui data jumlah kemiskinan Kabupaten Banyumas terbaru. 2. Mencantumkan ayat Al-Qur'an. 3. Menambahkan footnote.			
7	Kamis, 12 Desember 2013	1. ACC skripsi untuk ujian Munasosyal			

DAFTAR PUSTAKA

- A. Konsep Dasar Teori
B. Pengkajian
C. Perumusan Masalah
D. Perencanaan
E. Evaluasi

Dosen Pembimbing

H. Soehimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA/RISET/PKL
Nomor : 070.1 / 582 / IV / 2013

- Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Membaca
- Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, nomor : Stt.23/J.Sya /PP.009/072/2013 tanggal : 5 April 2013.
- Pertimbangan
- Perihal : Ijin Riset Individual.
- Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya
- Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : **LAELI ADHI SAPUTRI**
Alamat : Kedung Longsir Rt.003/005 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PROGRAM PINJAMAN BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI PURWODADI KEMBARAN BANYUMAS TAHUN 2009-2011)**
Bidang : Ekonomi Islam /X
Lokasi Penelitian : Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran
Lama Berlaku : 1 (Satu) bulan
Pengikut :
Penanggung Jawab : **Drs. H. Syufa'at, M.Ag**

AGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. wilayah setempat
Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang
Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat berwenang
Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon
Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 6 April 2013

An. KEPALA KESBANGPOL KAB. BANYUMAS
KASI BINA IDEOLOGI & WASBANG

HERI SETIYOMO, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19650908 199203 1 009

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Ka. BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

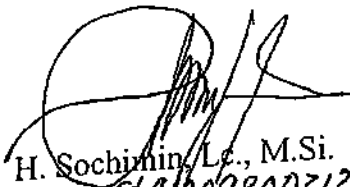
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/ 175.B /2012 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025
Smt./Prodi : IX/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program
Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa
Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009 - 2011)

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 27 November 2012



H. Sochimih/Lt., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 4 September 2012

Nomor : Stt.23/J.Sya/PP.009/175.B /2012
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. H. Sochimmin, Lc., M.Si.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syariah pada tanggal 29 Agustus 2012, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025
Smt./Prodi : IX/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Desa Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009 – 2011)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



H. H. Sochimmin, Lc., M.Ag.
0910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax . 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 252 /2013

Yang bertanda tangap di bawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan

bahwa :

Nama : Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025
Semester : XI
Jurusan / Prodi : Syariah / Ekonomi Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Di Purwodadi Kembaran Banyumas Tahun 2009-2011).

Pada tanggal 18 Maret 2013 dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Tata tulis yang disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi.
2. Mengubah penggunaan metode penelitian yang akan digunakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 23 Desember 2013

Ketua Sidang



Ketua Jurusan Syariah
Desa Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Iin Solikhin, M.A
NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/183/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah, menerangkan
bahwa :

Nama : Laeli Adhi Saputri

NIM : 082323025

Semester : X/ EI

Prodi : Ekonomi Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

Pada hari : Senin, 29 Juli 2013 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Juli 2013
Ketua Jurusan,

Syufa'at, M.Ag.
19630910 199203 1 005



Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R. 69/IX/2009

This is to certify that

Name : Laeli Adhi saputri
NIM : 082323025
D.O.B : Banyumas, March 30th 1990

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: July 11th 2009 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 44
 2. Structure and Written Expression : 44
 3. Reading Comprehension : 40
- Obtained Score : 427

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

STAIN Purwokerto, October 19th 2009
Language Center



STAIN Purwokerto, Lc. M.SI
NIP. 150 290 691

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونوكرتو
مركز اللغة و الثقافة

الشهادة

Nomor: Sti. ١٢/PBB/PP.٠٠٩/R.A/١٠.٣٦٨/٢٠١٢

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

(السيد/ السيدة) ليلى أدي سافوتري، رقم القيد : ٠٨٢٣٢٣٠٢٥

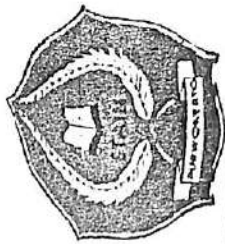
قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٨٠.٥
(جيد جدا)

بورونوكرتو، ٣ فبراير ٢٠١٢
رئيس مركز اللغة و الثقافة

سديا
Lc. M.SI

رقم الموظف : ٣١٠٠١.٣٢٦١٩٩٩.١٩٧٤



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Sertifikat

Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/077/2012

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Laeli Adhy Saputri / 082323025

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)
dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)
yang diselenggarakan pada Program Rutin bulan Mei 2012

Purwokerto, 09 Mei 2012

Kepala PPMP,



Abdulkhatib, M.Ag.

NIP. 19651205 199303 1 004

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	76
b. Tahfid	70
c. Kitabah	70
2. PPI	78



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/ 99 /2012

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)/Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN)
STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Laeli Adhy Saputri

NIM : 0822323025

Jurusan / Prodi : Syaria'h / EI

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Angkatan XXX STAIN Purwokerto Tahun 2012 di :

Desa : Cilongok

Kecamatan : Cilongok

Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012 dan dinyatakan LULUS, dengan nilai 94 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO

P3M STAIN PURWOKERTO



Purwokerto, 19 September 2012
Kepala P3M
Drs. Muhammad Irsyad, M.Pd.I, Purwokerto
NIP. 19681203 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1323 / VII /2010

Diberikan kepada :

LAELI ADHY SAPUTRI

NIM : 082323025

lahir pada tanggal : 30 Maret 1990 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2010



Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 19750907 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/029/2012

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 menerangkan bahwa :

Nama : 082323025
NIM : Laeli Adhi saputri
Jurusan/Prodi : Syari'ah/EI

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2011/2012 di :

BPRS Khasanah Ummat Kembaran

Selama 35 hari mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A-.

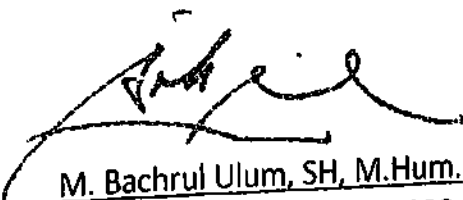
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 27 April 2012

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005


M. Bachrul Ulum, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : Laeli Adhi Saputri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Maret 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Purwodadi RT03 RW01 Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas 53182

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ach. Dimyati
2. Ibu : Siti Sundari

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Petani Ternak
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 01 Ledug Lulus Tahun 2002
2. MTs Negeri Model Purwokerto Lulus Tahun 2005
3. MAN Purwokerto 1 Lulus Tahun 2008
4. SI STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Lulus Teori Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 29 Januari 2014

Yang membuat,

Laeli Adhi Saputri
NIM : 082323025